

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN

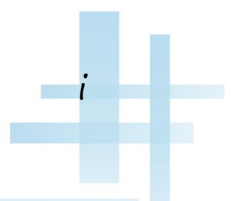
TAHUN 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra akan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.





Pamekasan, 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

NIP. 19680330 199803 1 006

Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.2.2 Telaah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	49
2.2.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 56	
2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	60
2.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	69
2.2.6 Telaah Dokumen RIPJPD	73
2.2.7 Isu Strategis	73
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	82
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025- 2029	82
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029	92



3.2.1 Integrasi Janji Politik dengan Renstra Perangkat Daerah	106
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	110
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	110
4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	198
BAB 5 PENUTUP	206



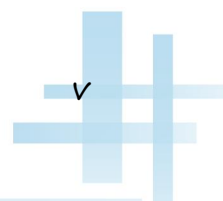
DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Status Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	22
Tabel 2-2 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	23
Tabel 2-3 Jumlah Pegawai berdasarkan dengan Golongan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	23
Tabel 2-4 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	24
Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	26
Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	32
Tabel 2-7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
Tabel 2-8 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	57
Tabel 2-9 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	62
Tabel 2-10 Telaah Dokumen KLHS Kabupaten Pamekasan	71
Tabel 2-11 Telaah Permasalahan dan Isu Strategis	75
Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	85
Tabel 3-2 Strategi dan Arah Kebijakan	93
Tabel 3-3 Tema Pembangunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pamekasan	100
Tabel 3-4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra-Perangkat Daerah	101
Tabel 3-5 Tahapan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	104
Tabel 3-6 Integrasi Janji Politik	108
Tabel 4-1 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	112
Tabel 4-2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan ...	156
Tabel 4-3 Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	193
Tabel 4-4 Indikator Kinerja Utama PD	201
Tabel 4-5 Indikator Kinerja Kunci PD	203



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Alur Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional	3
Gambar 2-1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	21
Gambar 2-2 Pohon Permasalahan Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	81
Gambar 3-1 Cascading Renstra Perangkat Daerah	91





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Renstra disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, serta tujuan kepala daerah. Secara fungsional, Renstra berperan sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, efektif, dan terukur, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penyusunan Renstra perangkat daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya pada urusan yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen

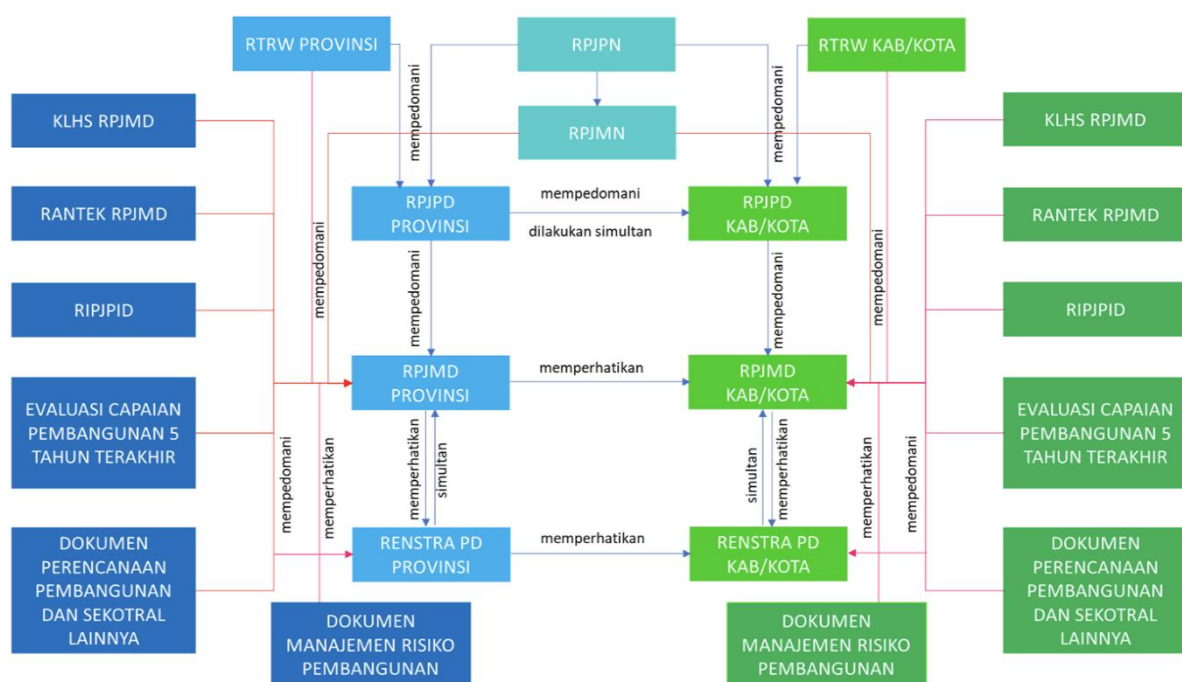


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sedangkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran operasionalnya pada level organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Dengan demikian, Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sinergis antarperangkat daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan juga perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra KL) dan Renstra Pemerintah Provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional dan regional. Keterpaduan antara Renstra pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menciptakan kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional hingga daerah, serta mencegah tumpang tindih program pembangunan antarwilayah dan antarlevel pemerintahan. Pada saat yang sama, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, kesinambungan antara Renstra dan Renja menjadi kunci dalam menjamin ketercapaian target pembangunan daerah.

Renstra perangkat daerah disusun berdasarkan kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui SPPN, seluruh

tahapan perencanaan pembangunan—mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga Rencana Kerja (RKP)—disinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alur keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut menunjukkan bahwa RPJM Nasional menjadi acuan bagi RPJM Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih operasional ke dalam Renstra serta Renja perangkat daerah. Dengan mekanisme ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh.



Gambar 1-1 Alur Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Sumber: UU no 25, 2004

Gambar di atas menjelaskan sistem keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam kerangka SPPN. Struktur tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antara RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, hingga Renstra perangkat daerah. Selain hubungan vertikal, sistem ini juga menggambarkan keterkaitan horizontal antar dokumen pendukung seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), Rencana Teknis (Rantek RPJMD), Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), serta evaluasi capaian

pembangunan lima tahun terakhir. Seluruh dokumen tersebut berfungsi memastikan bahwa rencana pembangunan bersifat berkelanjutan, adaptif, dan berbasis hasil evaluasi kinerja.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keterpaduan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Renstra tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional bagi perangkat daerah dalam mencapai sasaran RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan kerangka SPPN, seluruh tahapan perencanaan dari pusat hingga daerah terintegrasi secara vertikal dan horizontal, sehingga setiap program dan kegiatan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan Renstra yang berbasis data, memperhatikan dinamika lingkungan strategis, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan



- Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.



Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan :

Pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seperti Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.



BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan rencana strategis Perangkat Daerah beserta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pengelolaan Bahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pemberdayaan dan pengembangan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pembinaan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; dan



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- C. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Tata Bangunan membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 - 2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda;
 - 3) Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda.
- D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih. membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda ;
 - 2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda;
 - 3) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kebijakan di bidang Pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. Penilaian kinerja bawahan;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;



- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan peraturan perundangan – undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
- l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi sekretariat;
- n. Penilaian kinerja bawahan;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melakukan tugas dan fungsinya dibantu oleh dua (2) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Adapun tugas kedua sub bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian

Sub bagian perencanaan, umum, dan kepegawaian mempunyai tugas :



- a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas ;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Kantor ;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan, dan pengadaan barang kebutuhan Dinas ;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas ;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian ;
- i. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
- j. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- k. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas ;
- l. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- m. Menilai kinerja bawahan;
- n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. Menilai kinerja bawahan;
- e. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perumahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan

Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;

- f. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- h. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan;
- i. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- m. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- p. Penilaian kinerja bawahan;
- q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- r. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- s. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ada;
- t. Pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya;
- v. Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D. Tugas Pokok Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
- e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;



- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan pelaksanaan registrasi dan sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan rumah dan PSU dengan kemampuan kecil;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- h. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- i. Analisis data dan informasi kinerja bidang kawasan permukiman;
- j. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- k. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- l. Penilaian kinerja bawahan;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang kawasan permukiman;
- n. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Perencanaan, penataan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta penyehatan lingkungan permukiman;
- p. Fasilitasi dalam rangka perencanaan penyusunan program, kebijakan, dan strategi peningkatan dan pemeliharaan serta penyehatan lingkungan permukiman;
- q. Pengendalian, fasilitasi, pembinaan, dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyehatan lingkungan permukiman ; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

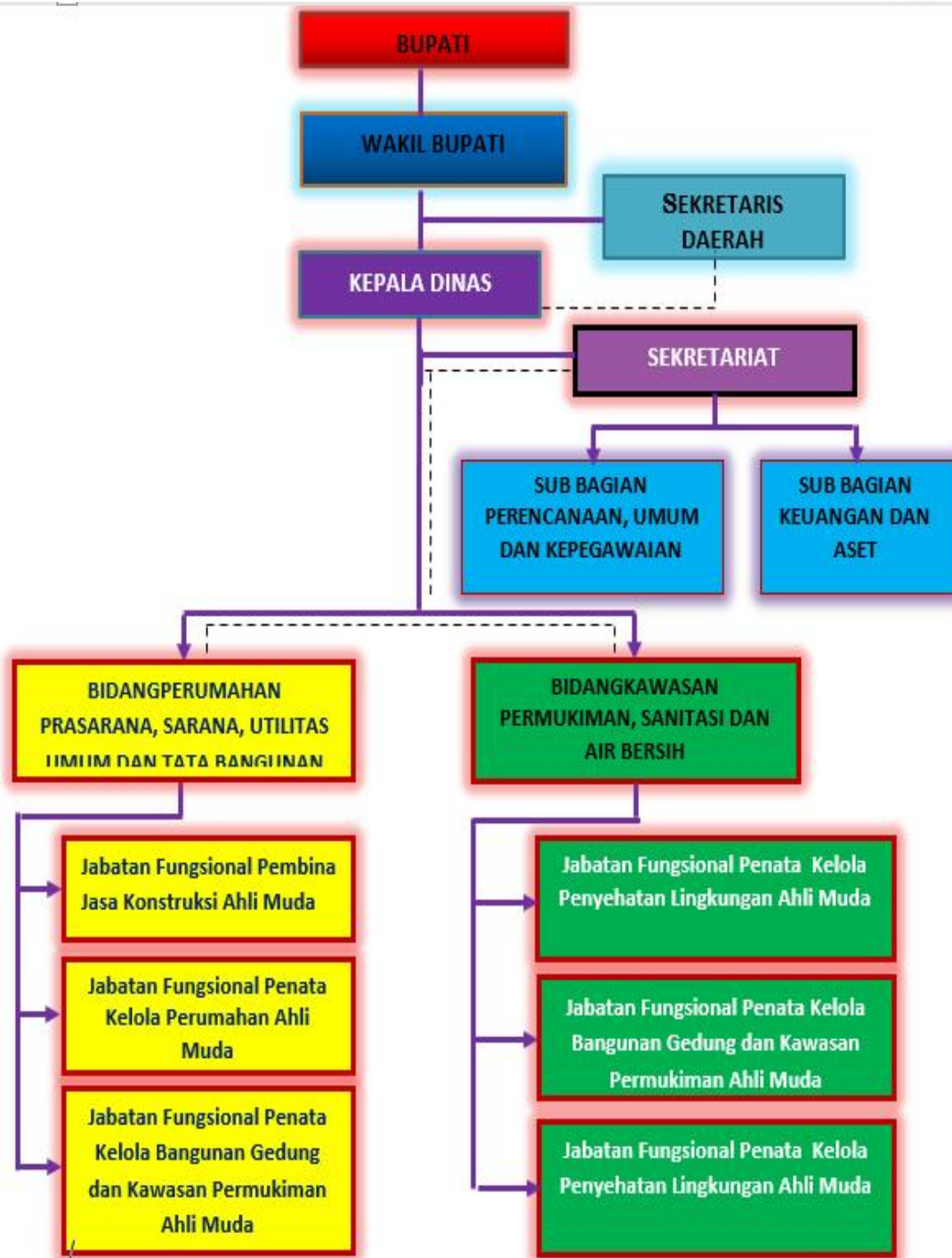


E. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1,2,3 huruf d angka 1,2,3 dan huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 2- 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai struktur organisasi terdiri dari 39 orang ASN dan 22 orang non ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebanyak 61 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2- 1 Status Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30 Orang
2.	PPPK	09 Orang
3.	Non ASN	22 Orang
JUMLAH		61 Orang

Sumber: Data Pegawai DPRKP Kabupaten Pamekasan, 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 61 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2-2 Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
1.	PNS	-	-	5	-	2	18	5	0	30
2.	PPPK	-	-	2	-	1	6	-	-	9
3.	Non ASN	-	-	4	1	-	17	-	-	22
JUMLAH		-	-	11	1	3	41	5	0	61

Sumber: Data Pegawai DPRKP Kabupaten Pamekasan, 2025

Berdasarkan Golongan Ruang, PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat di uraikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2-3 Jumlah Pegawai berdasarkan dengan Golongan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	2 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
4.	Pejabat Fungsional	10 Orang
5.	Staf/ Non Eselon	46 Orang

Sumber: Data Pegawai DPRKP Kabupaten pamekasan, 2025

B. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



Tabel 2- 4 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
1	Mobil	5	838.990.000	Kondisi Baik	-	-	
2	Sepeda Motor	10	149.158.800	Kondisi Baik	-	-	
3	Komputer	20	216.052.800	Kondisi Baik	-	-	
4	Laptop	18	164.398.457	Kondisi Baik	-	-	
5	Printer	27	106.931.200	Kondisi Baik	-	-	
6	Meja Kerja	58	108.876.000	Kondisi Baik	-	-	
7	Kursi Kerja	10	58.317.300	Kondisi Baik	-	-	
8	Ac	8	49.765.000	Kondisi Baik	-	-	
9	Lemari	16	86.946.500	Kondisi Baik	-	-	
10	Camera	4	36.240.000	Kondisi Baik	-	-	
11	Hard Disk	3	3.856.500	Kondisi Baik	-	-	
12	Alat Ukur	14	23.100.000	Kondisi Baik	-	-	
13	<u>Proyektor</u>	3	25.570.000	Kondisi Baik	-	-	
14	Loud Speker	2	1.280.400	Kondisi Baik	-	-	
15	Alat Kantor	16	5.600.000	Kondisi Baik	-	-	
16	Alat Penghancur rtas	1	2.750.000	Kondisi Baik	-	-	
17	Jam Elektronik	1	800.000	Kondisi Baik	-	-	



No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
18	Mesin Potong Rumput	1	8.500.000	Kondisi Baik	-	-	
19	Faksimil	1	2.495.000	Kondisi Baik	-	-	
20	Alat Besar Darat	1	31.622.250	Kondisi Baik	-	-	
21	Alat Rumah Tangga	1	59.100.000	Kondisi Baik	-	-	
22	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	1	9.800.000	Kondisi Baik	-	-	

Sumber: Dokumen Aset Dinas

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (V)	Target IKK/IKU (V)	Target Indikator SPM /NSPK/ LPPD (V)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun					Tahun					Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Permukiman Layak Huni		√		59,52%	59,73%	59,95%	60,09%		57,54%	52,04%	52,90%	55,76%		96,67%	87,13%	88,24%	92,79%	
2	Indeks Infrastruktur Perumahan dPermukiman		√						84,70%					82,01%					96,82%
3	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung		√		56,72%	67,83%	78,94%	90,06%	33,33%	54,25%	67,48%	95,35%	105,37 %	29,06%	95,65%	99,48%	120,78 %	117,01 %	87,19%
4	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi		√		10,00%	20,00%	60,00%	80,00%	33,33%	3,00%	11,86%	56,40%	56,43%	30,69%	30,00%	59,30%	94,00%	70,54%	92,08%
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		√		97,17%	97,37%	97,57%	97,77%	98,14%	95,51%	96,35%	92,43%	94,79%	94,93%	98,29%	98,95%	94,73%	96,95%	96,73%
6	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh		√		84,03%	63,03%	42,02%	21,01%	100,00 %	59,25%	62,10%	30,23%	19,96%	98,51%	70,51%	98,52%	71,94%	95,00%	98,51%
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		√		54,53 %	55,5 3%	56,5 3%	57,5 3%	58,5 3%	43,00 %	52,5 5%	43,9 7%	48,3 1%	49,7 1%	78,8 6%	94,6 3%	77,7 8%	83,9 7%	84,93 %
8	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan		√		64,65%	65,65%	66,65%	67,65%	68,65%	54,00%	62,52%	37,15%	59,35%	66,65%	83,53%	95,23%	55,74%	87,73%	97,09%
9	Nilai SAKIP		√		85	85	85	85	85	82,86	83,69	83,95	80,45	81,8	97,48%	98,46%	98,76%	94,65%	96,24%



10	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	√		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	67,09%	48,00%	75,70%	62,22%	70,36%	63,68%	60,00%	94,63%	77,78%	87,95%	94,92%
11	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	√		64,65%	65,65%	66,65%	67,65%	95,22%	61,59%	62,97%	62,73%	67,23%	94,58%	95,27%	95,92%	94,12%	99,38%	99,33%
12	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	√		24,00%	26,00%	28,00%	30,00%	33,33%	24,00%	25,63%	33,92%	34,24%	29,06%	100,00%	98,58%	121,14%	114,13%	87,19%
13	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten /kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator /teknisi/ analis	√		24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	92,16%	20,00%	8,16%	32,40%	13,20%	114,28%	83,33%	34,00%	135,00%	55,00%	124,00%
14	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-ndangan	√		n/a	n/a	28,57%	57,14%	71,14%	n/a	n/a	17,71%	65,71%	43,18%	n/a	n/a	61,99%	115,00%	60,70%
15	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	√		n/a	n/a	40,39%	100,00%	22,22%	100,00%	100,00%	11,82%	77,78%	11,64%	-	-	29,26%	77,78%	52,39%



16	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		√		127,25	127,25	101,31	97,07	81,4	0	25,94	4,24	0	8,37	0,00%	20,39%	4,19%	0,00%	10,28%
18	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yg Tertangani		√		258131	261376	264621	267866	271111	7770	6902	5330	4845	4342	3,01%	2,64%	2,01%	1,81%	1,60%
19	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU		√		28	31	41	45	49	20	21	26	29	30	71,43%	67,74%	63,41%	64,44%	61,22%
20	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			√	n/a	407	41	37	6	n/a	407	12	35	6	n/a	n/a	29,27%	94,59%	100,00%
21	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			√	n/a	221322	105499	147245	5092	n/a	157146	94949	130620	5092	n/a	71,00%	90,00%	88,71%	100,00%
23	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			√	n/a	210947	110661	110661	3948	n/a	204217	108661	105505	3948	n/a	96,81%	98,19%	95,34%	100,00%
24	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	√			100,00%		72,04%	66,59%	67,09%	87,82%		66,09%	66,36%	66,75%	87,82%	-	91,74%	99,65%	99,49%



25	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	√			100,00%		67,89%	95,22%	95,22%	73,29%		94,94%	95,04%	95,22%	73,29%	-	139,84%	99,81%	100,00%
26	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	√			100,00%	97,37%	97,57%	97,77%	97,58%	95,62%	96,35%	95,91%	96,79%	79,47%	95,62%	98,95%	98,30%	99,00%	81,44%

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel diatas menjadi acuan kami untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Berikut kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu :

1. Rumah tangga perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan sampai akhir tahun 2024 dari hasil pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PDAM yaitu sebesar 200.473 rumah tangga dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Pamekasan 301.303 rumah tangga atau sebesar 66,54%
2. Rumah tangga yang menerima manfaat dari hasil layanan pengolahan air limbah domestik sampai akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 255.234 rumah tangga, atau sekitar 94,14% dari 271.111 jumlah rumah di Kabupaten Pamekasan.
3. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh baik dari sumber dana APBD maupun APBN sampai tahun 2024 yaitu sebanyak 266.793 rumah layak huni, atau sekitar 98.41% dari 271.111 jumlah rumah.
4. Luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang sudah ditangani sampai tahun 2024 ini yaitu 8.37Ha, atau sekitar 10.28% dari 81.4Ha luasan kawasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Pamekasan tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman tahun 2019.
5. Masyarakat yang memperoleh layanan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2024



yaitu sebanyak 11 rumah dengan jenis bencana banjir, kebakaran dan angin puting beliung, atau sekitar 52.38% dari 21 rumah korban bencana yang akan ditangani. Capaian ini terhitung kecil karena pertama, sumber dananya bukan BTT (Belanja Tidak Terduga) sehingga pengelolaan anggarannya mengadopsi dari kegiatan RTLH. Kedua, pemilihan rumah korban bencana yang akan ditangani difokuskan pada rumah dengan tingkat kerusakan yang berat saja.



Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp698.466.000	-	-	-	-	Rp603.743.800	-	-	-	-	86,44%	-	-	-	-	-2,54%	5,82%
2	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman	Rp123.503.752.700	-	-	-	-	Rp117.543.007.750	-	-	-	-	95,17%	-	-	-	-	0,67%	8,96%
3	Program Penataan bangunan dan lingkungan	Rp2.450.000.000	-	-	-	-	Rp1.979.604.750	-	-	-	-	80,80%	-	-	-	-	-3,24%	117,47%
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp42.013.793.550	-	-	-	-	Rp36.323.389.000	-	-	-	-	86,46%	-	-	-	-	7,89%	11,27%
5	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	Rp100.860.000	-	-	-	-	Rp0	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,17%	0,00%



6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp6 16.337.021	-	-	-	-	Rp 534.893.105	-	-	-	-	86,79 %	-	-	-	-	5,87%	4,72%
7	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Rp5 60.000.000	-	-	-	-	Rp 519.677.118	-	-	-	-	92,80 %	-	-	-	-	9,24%	7,33%
8	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Rp6 4.000.000	-	-	-	-	Rp 43.292.900	-	-	-	-	67,65 %	-	-	-	-	-13,47%	-15,39%

SESUDAH PERUBAHAN

9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Rp1 240.337 .021	Rp 3.427.3 92.578	Rp 5.153.7 87.912	Rp 5.155.1 44.620	Rp5 618.906 .766	Rp 1.097.8 63.123	Rp 2.950.68 8.073	Rp 4.230.46 6.680	Rp 4.735.74 4.433	Rp 4.617.50 1.590	-	86,09 %	82,08 %	91,86 %	82,18 %	47,14%	44,32%
	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Rp 97.144. 000	Rp 105.852 .500	Rp 115.355 .067	Rp2 69.800.0 00	-	Rp4 5.763.35 0	Rp6 6.950.90 0	Rp1 08.300.2 50	Rp1 52.585.2 50	-	47,11 %	63,25 %	93,88 %	56,55 %	30,37%	28,57%
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Rp 1.859.0 61.952	Rp 2.931.3 19.194	Rp 3.286.8 32.680	Rp3 503.094 .826	-	Rp1 731.113 .990	Rp2 721.240 .402	Rp3 104.918. 253	Rp3 413.015 .229	-	93,12 %	92,83 %	94,47 %	97,43 %	15,28%	3,74%



	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Rp 148.980 .000	Rp 142.530 .000	Rp 0	Rp7 9.000.00 0	-	Rp8 5.950.00 0	Rp9 7.965.16 2	Rp0	Rp5 0.224.48 3	-	57,69 %	68,73 %	#DIV/ 0!	63,58 %	-20,87%	-17,20%
	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Rp 268.060 .850	Rp 361.318 .750	Rp 333.871 .969	Rp3 104.677.0 86	-	Rp1 56.237.0 28	Rp2 56.334.7 04	Rp3 19.636.7 81	Rp2 08.688.6 17	-	58,28 %	70,94 %	95,74 %	68,50 %	3,69%	-3,27%
	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Rp 325.269 .700	Rp 623.182 .600	Rp 335.903 .000	Rp2 86.484.8 54	-	Rp3 08.008.0 00	Rp3 06.100.0 00	Rp3 10.253.8 48	Rp5 4.800.00 0	-	94,69 %	63,56 %	92,36 %	19,13 %	6,16%	-12,16%
	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Rp 517.727 .640	Rp 681.939 .068	Rp 741.732 .904	Rp7 47.900.0 00	-	Rp4 82.434.8 30	Rp5 87.230.4 14	Rp5 96.888.6 37	Rp5 87.491.2 11	-	93,18 %	78,78 %	80,47 %	78,55 %	8,26%	1,92%
	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Rp 211.148 .436	Rp 307.645 .800	Rp 341.449 .000	Rp4 27.950.0 00	-	Rp1 41.180.8 75	Rp1 54.645.0 98	Rp2 95.746.6 64	Rp1 50.696.8 00	-	66,86 %	50,27 %	86,62 %	35,21 %	16,40%	7,26%
10	PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM	Rp3 4.201.78 8.750	Rp 44.604. 474.061	Rp 33.487. 139.869	Rp 35.817. 794.150	Rp3 4.590.88 4.900	Rp 28.946. 989.500	Rp3 9.918.51 9.501	Rp2 13.711.42 3.794	Rp3 0.474.72 3.378	Rp2 3.502.78 2.520	-	89,49 %	70,81 %	85,08 %	67,95 %	1,81%	0,59%



	PENYEDIA AIR MINUM																	
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp3 4.201.788.750	Rp 44.604.474.061	Rp 33.487.139.869	Rp 35.817.794.150	Rp3 4.590.884.900	Rp 28.946.989.500	Rp3 9.918.519.501	Rp2 3.711.423.794	Rp3 0.474.723.378	Rp2 3.502.782.520	-	89,49 %	70,81 %	85,08 %	67,95 %	1,81%	0,59%
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp7 .812.004.800	Rp 17.537.779.000	Rp 6.890.688.300	Rp 11.527.100.700	Rp1 3.761.135.700	Rp 7.376.399.500	Rp1 7.330.507.098	Rp6 456.143.000	Rp1 0.214.630.300	Rp1 2.338.591.000	-	98,82 %	93,69 %	88,61 %	89,66 %	30,09%	30,24%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp7 .812.004.800	Rp 17.537.779.000	Rp 6.890.688.300	Rp 11.527.100.700	Rp1 3.761.135.700	Rp 7.376.399.500	Rp1 7.330.507.098	Rp6 456.143.000	Rp1 0.214.630.300	Rp1 2.338.591.000	-	98,82 %	93,69 %	88,61 %	89,66 %	30,09%	30,24%
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp9 .831.647.600	Rp 4.924.999.999	Rp 6.775.130.499	Rp 8.833.174.087	Rp2 687.944.300	Rp 9.746.825.600	Rp4 601.419.500	Rp2 569.573.000	Rp8. 123.451.090	Rp1 864.531.330	-	93,43 %	37,93 %	91,97 %	69,37 %	-10,31%	8,43%



	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp9 831.647.600	Rp 4.924.999.999	Rp 6.775.130.499	Rp 8.833.174.087	Rp2 687.944.300	Rp 9.746.825.600	Rp4 601.419.500	Rp2 569.573.000	Rp8. 123.451.090	Rp1 864.531.330	-	93,43 %	37,93 %	91,97 %	69,37 %	-10,31%	8,43%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp1 13.672.105.100	Rp 84.514.474.480	Rp 103.186.894.800	Rp 96.818.720.403	-	Rp 107.796.182.150	Rp7 1.258.504.7270	Rp7 4.935.066.330	Rp8 7.128.317.570	-	-	84,32 %	72,62 %	89,99 %	-	-1,95%	-2,49%
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp1 13.672.105.100	Rp 84.514.474.480	Rp 103.186.894.800	Rp 96.818.720.403	-	Rp 107.796.182.150	Rp7 1.258.504.7270	Rp7 4.935.066.330	Rp8 7.128.317.570	-	-	84,32 %	72,62 %	89,99 %	-	-1,95%	-2,49%
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp2 450.000.000	Rp 4.700.459.932	Rp 8.925.000.000	Rp 5.761.205.661	Rp4 407.000.000	Rp 1.979.604.750	Rp4 407.481.806	Rp4 774.874.365	Rp5. 408.825.955	Rp2 725.878.079	-	86,11 %	53,50 %	93,88 %	61,85 %	24,56%	17,22%
	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian	Rp2 450.000.000	Rp 4.700.459.932	Rp 8.925.000.000	Rp 5.761.205.661	Rp4 407.000.000	Rp 1.979.604.750	Rp4 407.481.806	Rp4 774.874.365	Rp5. 408.825.955	Rp2 725.878.079	-	86,11 %	53,50 %	93,88 %	61,85 %	24,56%	17,22%



	Izin Mandiri Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp0	Rp31.549.439.350	Rp35.150.000.000	Rp4.262.407.400	Rp21.225.396.050	Rp0	Rp27.770.632.500	Rp31.607.675.450	Rp4.044.246.850	Rp82.894.790.970	-	88,02%	89,92%	94,88%	68,38%	533,52%	375,26%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp31.549.439.350	Rp35.150.000.000	Rp4.262.407.400	Rp21.225.396.050	Rp0	Rp27.770.632.500	Rp31.607.675.450	Rp4.044.246.850	Rp82.894.790.970	-	88,02%	89,92%	94,88%	68,38%	533,52%	375,26%
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp100.860.000	Rp250.000.000	Rp350.000.000	Rp400.000.000	Rp500.000.000	Rp0	Rp63.655.950	Rp91.145.900	Rp186.299.249	Rp308.615.495	-	25,46%	26,04%	46,57%	61,72%	45,43%	42,65%
	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp50.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp275.000.000	Rp300.000.000	Rp0	Rp40.193.350	Rp53.898.900	Rp133.001.749	Rp238.483.586	0,00%	20,10%	26,95%	48,36%	79,49%	69,32%	52,03%
	1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non	-	Rp50.000.000	-	-	-	-	Rp23.462.600	-	-	-	-	46,93%	-	-	-	-	-



	Kecil dan Kecil)																	
	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp5 0.000.000	-	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	Rp2 00.000.000	Rp 0	-	Rp3 7.247.000	Rp5 3.297.500	Rp7 0.131.909	0,00%	-	24,83%	26,65%	35,07%	6,67%	14,94%
17	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Rp0	-	Rp 1.257.499.626	Rp 1.225.000.000	Rp7 67.500.000	Rp 0	-	Rp5 13.457.050	Rp6 12.500.000	Rp1 92.500.000	-	-	40,83%	50,00%	25,08%	-7,99%	-9,86%
	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	Rp 499.999.626	-	-	-	-	Rp2 85.871.200	-	-	-	-	57,17%	-	-	-	-
	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	Rp 757.500.000	Rp 1.225.000.000	Rp7 17.500.000	-	-	Rp2 27.585.850	Rp6 12.500.000	Rp1 92.500.000	-	-	30,04%	50,00%	26,83%	4,06%	20,11%



18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp0	Rp2.838.234.650	Rp11.759.920.000	Rp2.104.920.000	Rp1.029.000.000	Rp0	Rp2.438.615.900	Rp1.139.232.650	Rp1.747.319.150	Rp7.30.291.200	-	85,92 %	96,89 %	83,01 %	70,97 %	36,22%	44,87%
	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang an Kawasan Permukiman	-	-	Rp190.000.000	Rp400.000.000	Rp500.000.000	-	-	Rp180.121.000	Rp0	Rp0	-	-	94,80 %	0,00%	0,00 %	4,61%	-20,00%
	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	Rp3499.900	Rp3500.000	Rp6500.000	Rp3800.000	-	Rp3380.700	Rp329365.000	Rp496357.750	Rp2225.950		94,74 %	94,10 %	76,36 %	59,25 %	8,99%	-0,80%
	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	Rp2.488.234.750	Rp11.219.920.000	Rp1.054.920.000	Rp594.000.000	-	Rp2.107.035.200	Rp10.884.746.650	Rp857.756.400	Rp502.165.250		84,68 %	97,01 %	81,31 %	84,54 %	43,33%	56,60%
19	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp6966.000	Rp12.635.000.000	Rp13.142.500.000	Rp6.107.500.000	Rp4.987.500.000	Rp603.743.800	Rp12.547.503.142.500.000	Rp1072.500.000	Rp6.072.500.000	Rp4.987.500.000	-	99,31 %	100,0 %	99,43 %	100,0 %	328,22%	382,27%



	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp69 66.000	Rp 12.635. 000.000	Rp 13.142. 500.000	Rp 6.107.5 00.000	Rp4 987.500 .000	Rp 603.743 .800	Rp1 2.547.50 0.000	Rp1 3.142.50 0.000	Rp6. 072.500 .000	Rp4 987.500 .000	-	99,31 %	100,0 0%	99,43 %	100,0 0%	328,22%	382,27%
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp0	Rp 55.900. 000	Rp 100.000 .000	Rp 72.500. 300	Rp5 0.000.00 0	Rp 0	Rp1 0.875.00 0	Rp4 0.007.60 0	Rp3 3.500.00 0	Rp7 204.750	-	19,45 %	40,01 %	46,21 %	14,41 %	4,07%	34,63%
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Rp0	Rp 55.900. 000	Rp 100.000 .000	Rp 72.500. 300	Rp5 0.000.00 0	Rp 0	Rp1 0.875.00 0	Rp4 0.007.60 0	Rp3 3.500.00 0	Rp7 204.750	-	19,45 %	40,01 %	46,21 %	14,41 %	4,07%	34,63%
21	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	-	-	-	-	Rp2 50.000.0 00	-	-	-	-	Rp0	-	-	-	-	0,00 %	0,00%	0,00%
	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerin tah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Rp2 50.000.0 00	-	-	-	-	Rp0	-	-	-	-	0,00 %	0,00%	0,00%



Sumber: Data diolah, 2025

Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh rasio antara realisasi anggaran dan pagu anggarannya mencapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pelayanan pada salah satu program Dinas tersebut dari segi pengelolaan pendanaan maupun fisiknya berjalan baik dan efektif. Demikian juga pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan sumber dana DAK, rasio antara realisasi dan anggarannya mencapai 99,9%. Faktor keberhasilan dari capaian tersebut dipengaruhi oleh kualitas personil (sumber daya manusia) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketersediaan bahan material dan tenaga kerja konstruksi di lapangan serta cuaca yang baik.

Sedangkan ada beberapa program yang rasio antara realisasi dan pagu anggarannya bisa dikatakan sedikit serapan anggarannya seperti misalnya pada Program Peningkatan PSU, Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Pengembangan Perumahan. Pada program peningkatan PSU capaian anggarannya 14,41% dimana hal ini disebabkan karena sedikitnya pihak pengembang yang sudah lengkap dokumen penyerahterimaan PSU nya ke Pemerintah Daerah Kabupaten. Pada program Penataan Bangunan Gedung serapan anggarannya sekitar 61,85% dikarenakan ada kondisi gagal bayar pada tahun berjalan. Pada Program Pengembangan Perumahan yang mana kegiatannya terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dimana serapan anggarannya juga sedikit yaitu sekitar 25,08%. hal ini disebabkan karena kegiatan ini sangat tergantung pada kondisi bencana alam yang terjadi sehingga tidak bisa diprediksi baik serapan anggarannya maupun kinerjanya.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:

- a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Badan Penanganan Bencana Daerah
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Perhubungan
 - f. Kejaksaan Negeri Pamekasan
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
 - a. PDAM
 3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Sumenep

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis yang efektif dan tepat sasaran bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tidak dapat dilepaskan dari identifikasi mendalam terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang ada di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam kondisi eksisting yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Pamekasan.

Permasalahan yang diinventarisir mencakup berbagai masalah yang beragam dari beberapa bidang, mulai dari ketersediaan dan kelayakan hunian, aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi yang masih belum merata, dan kondisi kawasan permukiman kumuh. Dari identifikasi permasalahan ini, kemudian dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi fokus utama Dinas dalam periode



perencanaan 2025-2029. Isu-isu strategis ini merupakan cerminan dari tantangan prioritas yang akan dijawab melalui program dan kegiatan Dinas, demi mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing.



Tabel 2- 7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani	Keterbatasan anggaran dana APBD untuk program RTLH. Di sisi lain, sangat sulit mendapatkan dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat	Masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni/RTLH sebagian besar tidak mempunyai biaya/bahan bangunan tambahan sebagai bentuk swadaya
		Sistem perencanaan dan pengelolaan data belum optimal, belum updatenya data RTLH dan perumahan	Beberapa desa ada yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan karena calon penerima bantuan bukan yang diajukan oleh pihak desa tersebut
		Kurangnya tenaga pelaksana di bidang perumahan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan	Pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terencana karena urbanisasi dapat mengakibatkan munculnya kawasan permukiman kumuh baru
2	PSU oleh pengembang belum maksimal diserahkan ke	Lemahnya pengawasan terhadap pengembang, seperti kurangnya regulasi internal yang mengatur sanksi dan	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengembang dalam menyerahkan fasilitas umum perumahan tepat waktu



	pemerintah daerah	sistem kontrol yang kuat untuk memastikan pengembang menyerahkan PSU tepat waktu.	Minimnya tekanan hukum terhadap pengembang yang tidak patuh
3	Cakupan akses layanan air minum jaringan perpipaan belum merata khususnya di wilayah perdesaan	Keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan jaringan SPAM.	Perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan sumber air baku sehingga sulit ditemukan titik air bersih
		Terbatasnya mitra kerja yang mempunyai alat pengeboran air bersih	Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi.
		Kurangnya data pemetaan wilayah cakupan akses layanan air minum layak	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana SPAM
4	Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik, terutama limbah rumah tangga dan Minimnya infrastruktur SPALD terpusat atau Komunal	Keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur SPALD terpusat	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi layak dan aman
		Belum lengkapnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan	Kebiasaan masyarakat membuang limbah langsung ke badan air.
5	Masih adanya Kawasan Permukiman Kumuh	Data permukiman kumuh tidak diperbarui secara berkala.	Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah perkotaan mengakibatkan permintaan terhadap lahan



			permukiman dan PSU nya meningkat
		Pendekatan perencanaan masih bersifat sektoral, belum ada rencana terpadu yang menyatukan semua aspek kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh	Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan baru sehingga dapat menimbulkan permukiman liar atau kawasan kumuh
6	Masih lemahnya pengawasan terhadap bangunan gedung, khususnya bangunan non-izin.	Keterbatasan SDM pengawas dan tenaga teknis bangunan	Tingkat kesadaran masyarakat dan pengembang terhadap izin dan fungsi teknis bangunan yang rendah
		Prosedur perizinan bangunan yang masih belum sepenuhnya terintegrasi	masih adanya bangunan liar yang tak sesuai RTRW

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang harus ditangani agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan internal dinas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkembang di tengah masyarakat maupun kondisi lingkungan strategis.

Permasalahan banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani masih menjadi isu utama. Di sisi internal, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran APBD, sulitnya mendapatkan dukungan dana dari provinsi maupun pusat, sistem perencanaan dan pengelolaan data RTLH yang belum optimal, serta terbatasnya tenaga pelaksana teknis di bidang perumahan. Sementara itu, dari sisi eksternal, sebagian besar masyarakat penerima manfaat tidak memiliki kemampuan finansial untuk swadaya, beberapa desa kurang kooperatif dalam proses penetapan penerima bantuan, dan adanya pertumbuhan kawasan permukiman akibat urbanisasi yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru.

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pihak pengembang yang belum maksimal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain lemahnya pengawasan dan belum adanya regulasi internal yang mengatur sanksi serta sistem kontrol yang kuat. Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengembang serta minimnya tekanan hukum bagi pengembang yang lalai turut memperburuk kondisi ini.

Cakupan akses layanan air minum jaringan perpipaan yang belum merata, khususnya di wilayah perdesaan. Keterbatasan APBD untuk pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), minimnya mitra kerja yang memiliki fasilitas pengeboran, serta kurangnya data pemetaan wilayah menjadi faktor internal yang menghambat. Sementara secara eksternal, perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air baku, tingginya pertumbuhan penduduk, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana SPAM menjadi tantangan tersendiri.

Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik akibat minimnya infrastruktur pengolahan limbah terpusat maupun komunal (SPALD). Faktor internal yang memengaruhi meliputi keterbatasan anggaran dan belum lengkapnya dokumen perencanaan induk SPALD. Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman serta kebiasaan membuang limbah langsung ke badan air menjadi persoalan serius.

Masih lemahnya pengawasan terhadap bangunan gedung, terutama bangunan tanpa izin, menjadi tantangan lain. Keterbatasan SDM pengawas serta tenaga teknis bangunan di internal dinas menyebabkan pengawasan belum optimal. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengembang terhadap kepatuhan perizinan, prosedur perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta maraknya bangunan liar yang tidak sesuai dengan RTRW semakin memperparah kondisi.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perumahan dan penataan kawasan permukiman membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi lintas sektor agar mampu mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan.

2.2.2 Telaah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

RPJMD Kabupaten Pamekasan menetapkan visi & misi bersama dengan sasaran strategis terkait peningkatan pelayanan publik: penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, merata, dan berkualitas. Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa komitmen tersebut menjadi nyata. Analisis terhadap dokumen RPJMD, Renstra OPD, serta evaluasi internal menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat

sejumlah faktor yang mendorong pencapaian sasaran, tetapi juga sejumlah hambatan yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Pamekasan telah menetapkan arah pelayanan publik yang baik, dengan beberapa capaian positif yang didorong oleh kebijakan, penggunaan teknologi, pengawasan, dan komitmen pemerintah daerah. Namun, berbagai penghambat masih nyata seperti SDM, koordinasi, prosedur, fasilitas, dan budaya pelayanan perlu diperbaiki. Jika faktor-penghambat tersebut ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, maka peluang Pemkab Pamekasan untuk mencapai sasaran RPJMD pada pelayanan publik menjadi lebih besar.



Tabel 2- 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia			
	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Belum terpenuhinya 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.	Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih masih rendah.
			Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan limbah domestik	Tersedianya peluang investasi sanitasi sektor	Kurangnya insentif dan regulasi yang menarik bagi swasta.
			Belum tersedia kebijakan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik	Dukungan dari pusat untuk perencanaan pengelolaan air limbah.	Keterbatasan SDM teknis dan anggaran penyusunan regulasi daerah.



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Belum tersedia pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Adanya bantuan teknis dari pemerintah pusat melalui program PPSP.	Keterbatasan anggaran pembangunan sarana IPLT dan operasionalnya.
			Saluran drainase bercampur dengan saluran limbah domestik	Dukungan masyarakat untuk peningkatan kebersihan lingkungan.	Keterbatasan anggaran dan perencanaan drainase teknis lingkungan.
			Belum terpenuhinya akses air minum layak	Adanya program PAMSIMAS dan bantuan pusat.	Kondisi geografis dan batasan sumber air baku.
			Belum terpenuhinya akses drainase	Tersedianya rencana teknis dan lokasi prioritas.	Anggaran terbatas dan kondisi lahan yang tidak mendukung.
			Belum terpenuhinya akses jalan lingkungan kondisi baik	Adanya dukungan dari dana kelurahan dan partisipasi masyarakat.	Keterbatasan dana APBD dan peningkatan volume kendaraan berat.
			Belum terpenuhinya fasilitas MCK	Adanya dukungan program sanitasi dari pusat dan desa.	Keterbatasan lahan dan kebiasaan masyarakat yang masih BAB sembarangan.



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Sebagian besar masyarakat yang bermukim pada kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah	Dukungan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan BSPS.	Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan keterbatasan subsidi.
			Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses minum layak	Adanya lembaga pembiayaan perumahan dan program pemerintah pusat.	Keterjangkauan harga dan rendahnya daya beli masyarakat.
			Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Rumah Layak Huni	Adanya lembaga pembiayaan perumahan dan program pemerintah pusat.	Keterjangkauan harga dan rendahnya daya beli masyarakat.
			Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Sanitasi	Adanya lembaga pembiayaan perumahan dan program pemerintah pusat.	Keterjangkauan harga dan rendahnya daya beli masyarakat.



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Belum tersedianya RPH yang representatif (SNI), RPH yang ada saat ini belum memiliki IPAL yang memadai dan sumber air	Dukungan teknis dari kementerian terkait.	Kurangnya koordinasi lintas sektor (Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Perkim).
			Kerusakan pada jalan dan jembatan cukup tinggi	Program pemeliharaan infrastruktur daerah	Curah hujan tinggi dan beban kendaraan melebihi kapasitas.
			Pasarana penunjang kawasan strategis ekonomi cepat tumbuh belum terpenuhi	Potensi wilayah strategis tinggi (akses perdagangan, wisata, dan industri kecil).	Keterbatasan investasi dan belum adanya perencanaan kawasan terpadu.
Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Menurunnya risiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Dukungan program bantuan pascabencana dari BPBD dan pemerintah pusat.	Proses verifikasi dan penyaluran bantuan yang lama serta batasan lahan aman.
	Meningkatnya kapasitas daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Belum terpenuhinya akses masyarakat	Adanya program SPAM IKK dan DAK Air Minum.	Kondisi topografi dan kualitas sumber air baku



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
	penanggulangan bencana		terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (mitigasi struktural)		rendah.

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2029



2.2.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan mendalam terhadap arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang termuat dalam Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Provinsi bertujuan untuk menyelaraskan arah sebagai landasan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan.



Tabel 2- 8 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/Tantangan	Peluang
SASARAN RENSTRA K/L					
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Masih tingginya backlog perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Komitmen pemerintah melalui program strategis nasional seperti PSR (Program Sejuta Rumah).	Kendala dalam pengumpulan dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman.	Urbanisasi cepat, meningkatkan permintaan perumahan dan tekanan terhadap infrastruktur eksisting	Kemitraan dengan sektor swasta dan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur.
	Kualitas bangunan dan infrastruktur yang bervariasi, tidak semua memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan.	Dukungan regulasi seperti Perpres tentang penyediaan perumahan untuk MBR, serta Undang-undang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Kinerja pengawasan lapangan yang belum konsisten, menyebabkan potensi penyimpangan dalam pembangunan.	Perubahan iklim dan bencana alam, meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kelayakan permukiman.	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan sehat
	Kurangnya sinergi lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur permukiman terpadu.	Teknologi pembangunan perumahan yang mulai berkembang	Koordinasi antarlembaga belum optimal, khususnya antara pusat dan daerah	Kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, berdampak pada keterjangkauan harga rumah.	Pemanfaatan teknologi digital untuk perencanaan, monitoring, dan pengawasan pembangunan.



		Sumber daya manusia profesional di lingkungan kementerian.	Kapasitas SDM teknis di daerah masih terbatas.	Keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar.	Dukungan internasional dan donor untuk program perumahan dan permukiman berkelanjutan
				Perubahan kebijakan fiskal nasional, yang dapat memengaruhi alokasi anggaran sektor perumahan.	
SASARAN RENSTRA PROVINSI					
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Kesenjangan distribusi hunian: dominan terfokus di kawasan tapal kuda dan wilayah Gerbangkertosusila	Komitmen pemerintah provinsi dalam RPJMD dan Renstra sektor perumahan	Anggaran APBD yang terbatas untuk pembangunan perumahan dan permukiman	Urbanisasi tinggi di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya menimbulkan tekanan kebutuhan hunian	Dukungan pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program nasional (PSR, BPS)
	Masih banyak kawasan kumuh urban dan pesisir yang belum tertangani optimal.	Adanya Perda dan regulasi teknis terkait perumahan dan permukiman	Backlog perumahan masih tinggi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan pesisir	Potensi kemitraan dengan swasta dan skema KPBU
	Masih banyak kawasan kumuh urban dan pesisir yang belum tertangani optimal.	Adanya Perda dan regulasi teknis terkait perumahan dan permukiman	Backlog perumahan masih tinggi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan pesisir	Potensi kemitraan dengan swasta dan skema KPBU



	Kurangnya rumah subsidi dan rusunawa di daerah industri/padat migrasi kerja.	Tersedianya lahan di beberapa kabupaten /kota untuk pengembangan kawasan perumahan	Penyebaran hunian dan permukiman belum merata	Kenaikan harga bahan bangunan	Inovasi teknologi pembangunan rumah
	Belum optimalnya pelibatan swasta lokal dan BUMDes dalam pengembangan hunian terpadu.	Terdapat program seperti Rumah Layak Huni (RLH) dan bantuan stimulan	Koordinasi antar-OPD dan dengan pemkab/pemkot belum maksimal	Perubahan iklim meningkatkan risiko permukiman di daerah rawan bencana (banjir, longsor)	Kebutuhan tinggi akan hunian yang sehat pasca pandemi
	Kualitas permukiman belum seluruhnya layak secara infrastruktur dasar (jalan, sanitasi, air bersih).	Kemitraan lokal dengan BUMD dan pengembang	Data perumahan dan permukiman belum terintegrasi secara menyeluruh	Ketimpangan pembangunan antarwilayah (selatan vs utara Jawa Timur)	Digitalisasi dan sistem informasi perumahan mulai berkembang di beberapa daerah

Sumber: Dokumen Renstra K/L dan Provinsi Urusan Perhubungan



Pembangunan perumahan dan permukiman menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Permasalahan utama meliputi tingginya backlog perumahan, kualitas hunian yang belum memadai, ketimpangan distribusi wilayah, serta lemahnya koordinasi antar pihak. Meskipun demikian, terdapat faktor pendorong seperti dukungan regulasi, komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta ketersediaan program nasional dan lokal yang mendukung sektor ini. Hambatan terbesar terletak pada keterbatasan anggaran, kapasitas SDM teknis, dan belum terintegrasinya data secara menyeluruh. Di sisi eksternal, urbanisasi cepat dan keterbatasan lahan menjadi tantangan serius. Namun, peluang besar juga tersedia, seperti kemitraan dengan sektor swasta, dukungan pendanaan pusat, serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi pembangunan rumah.

Secara keseluruhan, kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas daerah, serta pemanfaatan peluang inovatif menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan hunian dan permukiman yang layak bagi masyarakat.

2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2023-2043. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan serta karakteristik wilayah, isu-isu strategis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, memiliki faktor pendorong dan penghambat



pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2-9 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan jaringan SPAM unit baku	Kecamatan Proppo	Menjamin ketersediaan air baku yang memadai untuk kebutuhan air bersih masyarakat.	Ketersediaan sumber air baku terbatas, kualitas air baku rawan pencemaran.	Ketergantungan pada sumber air permukaan/tanah yang menurun, kurangnya infrastruktur pendukung.	Dukungan program SPAM dengan sumber dana DAK, potensi sumber air lokal
2	Pengembangan SPAM unit produksi	Semua Kecamatan	Peningkatan kapasitas produksi air minum bagi seluruh masyarakat di Pamekasan	Kapasitas produksi belum merata antar kecamatan, biaya operasional tinggi.	Keterbatasan anggaran, minimnya SDM teknis, serta biaya listrik/pompa yang mahal.	Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), peluang kerjasama dengan PDAM
3	Pengembangan jaringan SPAM unit distribusi	Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Galis, Kecamatan Kadur, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan,	Memperluas cakupan distribusi air minum ke wilayah pedesaan dan perkotaan.	Distribusi belum merata, banyak jaringan pipa tua/rusak, dan kebocoran tinggi.	Biaya pembangunan jaringan besar, kondisi geografis berbukit/berbatu, serta pembebasan lahan yang sulit.	Program hibah air minum, kolaborasi pemerintah desa, dukungan masyarakat



		Kecamatan Pasean, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Waru				
4	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari bangunan penangkap mata air	Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru	Menjamin kontinuitas penyediaan air baku dari sumber alami.	Debit mata air menurun saat musim kemarau, kualitas air tidak selalu memenuhi standar.	Alih fungsi lahan resapan, kerusakan lingkungan, dan minimnya konservasi daerah tangkapan air.	Adanya mata air potensial, dukungan konservasi dari masyarakat dan LSM



5	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari sumur pompa	Kecamatan Galis, Kadur, Larangan, Palengaan, Pegantenan, Proppo, dan Waru	Menambah kapasitas penyediaan air bersih berbasis sumur dalam.	Sumur cepat kering, kualitas air tanah mengandung zat berbahaya (Fe, Mn, salinitas).	Eksplorasi air tanah berlebihan, keterbatasan teknologi pengolahan, biaya operasional tinggi.	Potensi sumur dalam, dukungan teknologi pengolahan air
6	Kajian pengelolaan limbah domestik yang mudah dan murah	Kabupaten Pamekasan	Memberikan alternatif solusi pengelolaan limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga.	Rendahnya kapasitas SDM, minimnya inovasi teknologi, keterbatasan dana penelitian.	Adanya program SANIMAS, peluang inovasi lokal
7	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah infrastruktur di permukiman padat	WP Perkotaan	Mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan.	Banyak permukiman padat belum memiliki sistem pengolahan limbah terpadu.	Keterbatasan lahan, biaya pembangunan tinggi, serta resistensi masyarakat.	Dukungan program DAK Sanitasi, potensi kemitraan dengan swasta
8	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten Pamekasan	Meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat secara luas.	Rendahnya akses masyarakat terhadap septic tank individual/komunal.	Kurangnya sosialisasi, kebiasaan masyarakat membuang limbah ke sungai, minimnya dukungan anggaran.	Program SANIMAS, dan partisipasi masyarakat



9	Pengembangan sistem pengelolaan infrastruktur air limbah di infrastruktur permukiman padat limbah non nfrastr di nfrast industri	Kecamatan Kadur, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pamekasan, Pasean, Proppo, Tlanakan dan Waru	Mengendalikan limbah padat dan cair agar tidak mencemari lingkungan.	Limbah industri dan rumah tangga sering bercampur tanpa pengolahan.	Biaya instalasi mahal, lemahnya penegakan regulasi, dan rendahnya partisipasi pelaku usaha.	Dukungan regulasi dari pemerintah daerah (Perda), peluang kerjasama dengan pelaku usaha
10	Penetapan infrastruktur permukiman perkotaan	Kabupaten Pamekasan	Menetapkan daftar lokasi infrastruktur prioritas (jalan lingkungan, drainase, jaringan air, penerangan) serta memberi arah bagi perencanaan dan alokasi anggaran PD. perlu menyiapkan program pemeliharaan, pengawasan teknis, dan koordinasi dengan OPD lain untuk pelaksanaan infrastruktur tersebut.	Kurangnya data terpadu mengenai kondisi infrastruktur eksisting (inventarisasi belum lengkap), sehingga perencanaan prioritas kurang akurat; proses sinkronisasi antar OPD dan desa kadang lambat; pemeliharaan pasca-pembangunan belum terjadwalkan dengan jelas.	Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan; masalah pembebasan lahan di area perkotaan; kapasitas teknis staf PD yang masih perlu penguatan; dinamika politik lokal yang memengaruhi prioritas proyek.	Tersedianya kerangka kebijakan (RPJMD/RTRW) sebagai dasar prioritas; dukungan dana dari pusat/provinsi (mis. DAK); partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pemeliharaan



11	Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Perkotaan dan Pedesaan	Kabupaten Pamekasan	RKP menyediakan peta investasi jangka menengah-panjang sehingga PD dapat menyusun program teknis, anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang lebih terarah (mis. lokasi SPAM, jaringan drainase, lokasi PSU).	Keterbatasan data dasar (peta tapak, batas administrasi, data warga kurang rinci); kapasitas staf perencanaan menghadapi beban penyusunan dokumen teknis dan partisipasi publik; proses konsultasi publik yang memerlukan waktu dan sumber daya.	Perubahan kebijakan/anggaran yang cepat; konflik kepemilikan lahan; rendahnya koordinasi lintas OPD; kurangnya akses ke tenaga ahli perencanaan.	Kebutuhan nyata di lapangan menjadi motivasi penyusunan RKP; ketersediaan template dan panduan teknis dari pusat/provinsi; peluang bantuan teknis dan pembiayaan bila RKP sudah terformulasikan (mis. syarat DAK/BSPS/KOTAKU)
12	Menerapkan prinsip hunian berimbang rumah, rumah deret dan rumah susun di permukiman perkotaan. Serta rumah tinggal di permukiman pedesaan	Kabupaten Pamekasan	PD harus menyiapkan kebijakan dan standar desain yang mendorong variasi tipologi hunian sesuai kebutuhan demografis dan ketersediaan lahan. Layanan teknis perizinan, pengawasan konstruksi, dan fasilitasi pembiayaan menjadi lebih kompleks.	Regulasi dan zonasi belum sepenuhnya mendukung hunian bertingkat; mekanisme insentif/relokasi bagi pengembang atau masyarakat belum jelas; kebutuhan sosialisasi untuk mengubah preferensi masyarakat terhadap hunian vertikal.	Keterbatasan lahan milik pemerintah; resistensi budaya terhadap hunian vertikal; akses pembiayaan untuk pengembang skala kecil; keterbatasan kapasitas pengembang lokal untuk bangunan susun.	Meningkatnya tekanan permukiman di pusat kota mendorong solusi hunian padat; kemungkinan memanfaatkan lahan kosong milik daerah; kebijakan insentif (mis. kemudahan perizinan, subsidi) dan potensi kerjasama dengan investor/Perumnas/PDAM.



13	Pemenuhan PSU pada kawasan permukiman eksisting dan pengembangan PSU pada kawasan permukiman baru	Kabupaten Pamekasan	Pemenuhan PSU berarti PD perlu merencanakan dan mengawal penyediaan infrastruktur dasar (jalan akses, drainase, jaringan air, sanitasi) terintegrasi dengan pengembangan permukiman baru dan revitalisasi kawasan lama.	Banyak kawasan eksisting belum dilengkapi PSU yang memadai; Para pengembang perumahan belum semuanya menyerahkan PSU ke Pemkab; kurangnya mekanisme pemeliharaan berkelanjutan setelah pembangunan.	Biaya investasi awal yang besar; koordinasi antar OPD dan pihak swasta yang rumit; status hukum lahan yang tidak jelas sehingga pembangunan tertunda; keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan.	Kebijakan pembangunan wilayah dan kemudahan perizinan untuk pengembangan terintegrasi; potensi pembiayaan campuran (APBD + dana desa + CSR + swasta); dukungan masyarakat lokal bila manfaatnya jelas.
14	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni, dan Rumah di Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Pamekasan	Meningkatnya kebutuhan program penanganan kumuh, relokasi terencana, rehabilitasi rumah, serta penerapan standar tahan bencana. PD perlu menyiapkan layanan teknis, data penerima bantuan, dan mekanisme pemantauan pasca-intervensi.	Sulitnya identifikasi dan verifikasi penerima bantuan (data kependudukan & kepemilikan lahan tidak rapi); keterbatasan kapasitas untuk mendesain rumah tahan bencana yang terjangkau; tantangan logistik saat terjadi bencana.	Lokasi permukiman kumuh sering berada di tanah milik pribadi atau zona rawan; keterbatasan anggaran untuk program skala besar; resistensi relokasi dari warga; rantai pasokan material konstruksi yang mahal.	Tersedianya program nasional (BSPS, KOTAKU, bantuan rehabilitasi/rekonstruksi dari BNPB) serta sektor swasta; meningkatnya kesadaran mitigasi bencana di masyarakat; dukungan teknis dari provinsi/kementerian.



15	Pengembangan infrastruktur permukiman baru	Kabupaten Pamekasan	Perlu perencanaan yang holistik (menyeluruh dan terpadu) agar pengembangan baru langsung dilengkapi PSU—mengurangi risiko munculnya permukiman kumuh baru. PD perlu mempercepat proses perizinan, penyusunan studi kelayakan, dan pengaturan lahan.	Kesenjangan antara rencana tata ruang dengan pelaksanaan di lapangan (developer bergerak tanpa melengkapi PSU), pengawasan pelaksanaan yang lemah, dan keterlambatan pengadaan tanah untuk akses.	Spekulasi harga tanah, prosedur perizinan yang memakan waktu, dan keterbatasan koordinasi antar instansi terkait (perizinan, lingkungan, tata ruang).	Minat investor untuk pengembangan perumahan, serta dukungan kebijakan daerah yang mendorong pengembangan terencana.
----	--	---------------------	---	---	---	---

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Pamekasan



2.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen dalam memberikan acuan terhadap perencanaan pembangunan daerah sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga memperhatikan serta mengintegrasikan perencanaan daerah terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga penelaahan KLHS terhadap RPJMD perlu dilakukan untuk memastikan integrasi dan linearisasi hasil KLHS terhadap dokumen RPJMD. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD berfokus dalam mengkaji capaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial serta hukum dan tata kelola dalam pemanfaatannya. dalam pencapaian TPB/SDGs secara global terhadap 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah hingga terdapat 193 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB/SDGs di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator TPB di Kabupaten Pamekasan terdapat 109 indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dengan prosentase 56,48%. Terdapat 54 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dengan prosentase 27,98%, terdapat 23 indikator TPB yang tidak atau belum tersedia datanya dengan prosentase 11,92 dan terdapat 7 indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dengan prosentase 3,63%.

Berdasarkan hasil capaian TPB tersebut selanjutnya tersusun beberapa permasalahan pembangunan berkelanjutan dimana dari beberapa permasalahan diolah hingga muncul isu strategis pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan isu strategis KLHS RPJMD diatas terdapat 6 isu strategis, antara lain Kesejahteraan masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, Aksesibilitas Air bersih dan Sanitasi, Penguatan ketahanan bencana dan lingkungan, Akselesari ketahanan pangan dan penguatan tata kelola

pemerintahan. Dari ke enam isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutan ditentukan isu prioritas dengan penentuan skala yang dijalankan sesuai aturan sehingga ditentukan 4 isu prioritas pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Masyarakat
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Dari keempat isu prioritas pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan sehingga perlu dilinearitaskan terhadap isu perencanaan pembangunan daerah.



Tabel 2- 10 Telaah Dokumen KLHS Kabupaten Pamekasan

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
1	Tingginya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	meningkatnya kebutuhan akan penataan lingkungan, penyediaan sarana prasarana dasar, serta peningkatan kualitas hunian masyarakat	keterbatasan anggaran, rendahnya koordinasi lintas sektor, serta lambatnya proses perencanaan dan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh	mengintegrasikan program lintas perangkat daerah (crosscutting), menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan program penataan kawasan kumuh	program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dukungan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta adanya potensi pemberdayaan masyarakat lokal dalam penataan lingkungan
2	Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Air Bersih dan Sanitasi	meningkatnya tuntutan pelayanan PD di bidang perumahan, kawasan permukiman, serta infrastruktur dasar	keterbatasan jaringan distribusi air bersih, kualitas sumber air yang menurun akibat pencemaran, serta rendahnya cakupan layanan sanitasi aman	keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan air, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan akses air minum dan sanitasi layak bagi semua, dukungan kerjasama pemerintah-swasta, serta potensi pengembangan teknologi pengolahan air bersih dan sanitasi ramah lingkungan.



3	Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	meningkatnya tanggung jawab pelayanan PD dalam penyediaan bantuan perbaikan rumah layak huni bagi korban bencana	keterbatasan data korban yang valid, lambatnya mekanisme penyaluran bantuan, serta minimnya sumber daya manusia dan anggaran dalam penanganan cepat pascabencana	tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu singkat dan kualitas yang memadai, koordinasi lintas lembaga yang kompleks, serta risiko terulangnya bencana di lokasi yang sama	kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kesadaran masyarakat dalam membangun hunian yang tahan bencana.
---	--	--	--	--	---

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Pamekasan



2.2.6 Telaah Dokumen RIPJPD

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen Rencana Induk Pengembangan Investasi Jangka Panjang Infrastruktur Daerah (RIPJPID) Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa baik dari sisi program maupun kegiatan yang tercantum di dalam dokumen tersebut, tidak terdapat keterkaitan langsung dengan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. RIPJPID lebih banyak berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur strategis daerah seperti transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Sementara itu, urusan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas permukiman, penataan kawasan kumuh, dan pengelolaan bangunan gedung, belum terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen tersebut.

Meskipun demikian, hasil telaah ini tetap menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi sinergi lintas sektor, khususnya dalam hal pengembangan kawasan perkotaan, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, serta peningkatan kualitas lingkungan hunian. Dengan demikian, ke depan diperlukan upaya integrasi dan penyelarasan antara program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan arah kebijakan investasi infrastruktur daerah agar tercipta keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.

2.2.7 Isu Strategis

Pembangunan sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam hal pemenuhan kualitas pelayanan infrastruktur permukiman. Seiring dengan dinamika pembangunan dan tantangan yang terus berkembang, DPRKP Kabupaten Pamekasan perlu merumuskan isu-isu strategis yang relevan dan mendesak untuk menjadi fondasi Renstra 2025-2029. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Dinamakan isu strategis karena mengandung masalah atau tantangan fundamental yang jika tidak ditangani dengan serius dan terencana, akan menghambat pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi atau entitas. Adapun isu-isu strategis yang berdampak pada pembangunan sektor perumahan dan permukiman yaitu :

Dalam merumuskan isu-isu strategis diatas diperlukan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Berikut adalah review dari kelima faktor tersebut.



Tabel 2- 11 Telaah Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup	Belum terpenuhinya 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis masyarakat)	Tingginya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Perubahan iklim yang memperparah kondisi lingkungan perkotaan dan kualitas udara.	Agenda nasional peningkatan kualitas lingkungan organisasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).	Masih tingginya kawasan kumuh di wilayah perkotaan Pamekasan.	Peningkatan akses infrastruktur dasar organisasi (air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, MCK) untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
	Sebagian besar masyarakat yang bermukim pada kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah	Tingginya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Belum terpenuhinya akses air minum layak	Rendahnya akses air bersih dan sanitasi layak				
	Belum terpenuhinya akses drainase	Rendahnya akses sanitasi dan drainase layak				
	Belum terpenuhinya akses jalan lingkungan kondisi baik	Rendahnya akses infrastruktur lingkungan dasar				



	Belum terpenuhinya fasilitas MCK	Rendahnya sanitasi akses layak dan aman				
Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup	Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan limbah domestik	Rendahnya akses rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman (air limbah, sampah, drainase)	Tekanan terhadap sumber daya udara dan pencemaran lingkungan akibat limbah domestik	Kebijakan nasional pengelolaan air limbah domestik dan pengurangan pencemaran lingkungan (Permen LHK No. P68/2016)	Minimnya fasilitas pengolahan limbah domestik di Kabupaten Pamekasan	Penguatan sistem pengelolaan limbah domestik dan pembangunan IPLT untuk mendukung lingkungan sehat dan berkelanjutan.
	Belum tersedia kebijakan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik	Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan air limbah				
	Belum tersedia pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rendahnya kapasitas pengelolaan limbah domestik				
	Saluran drainase bercampur dengan saluran limbah domestik	Pencemaran lingkungan akibat limbah campuran				
Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup	Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses minum layak	Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat	Krisis air bersih akibat perubahan iklim dan eksploitasi air tanah berlebih	Program air minum aman dan berkelanjutan (Permen PUPR No. 27/2021)	Keterbatasan sumber air baku dan distribusi air bersih di wilayah Pamekasan	Peningkatan akses air minum yang layak dan berkelanjutan melalui penguatan SPAM berbasis masyarakat.



	Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Rumah Layak Huni	Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat		Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah	Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan
	Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Sanitasi	Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat	Pencapaian SDGs tujuan 6: air bersih dan sanitasi layak untuk semua	RPJMN 2025–2029 menargetkan akses universal untuk sanitasi yang aman	Masih rendahnya akses sanitasi aman di perdesaan Pamekasan.	Peningkatan akses dan kualitas sanitasi layak bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan
	Belum tersedianya RPH yang representatif (SNI), RPH yang ada saat ini belum memiliki IPAL yang memadai dan sumber air	Rendahnya sarana pendukung sanitasi masyarakat				
	Kerusakan pada jalan dan jembatan cukup tinggi	Rendahnya kualitas infrastruktur lingkungan				
	Prasarana penunjang kawasan strategis ekonomi cepat tumbuh belum terpenuhi	Rendahnya konektivitas infrastruktur antar wilayah				



Tingginya resiko bencana	Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Belum optimalnya penanganan pasca bencana	Meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim global (banjir, kekeringan)	Penguatan ketahanan perumahan terhadap bencana (RTRWN dan RPJMN 2025–2029).	Masih terbatasnya program perumahan tetap bagi korban bencana di Pamekasan.	Peningkatan ketahanan perumahan terhadap bencana dan penyediaan perumahan layak pascabencana.
	Belum terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (mitigasi struktural)	Rendahnya pelayanan SPAM di wilayah rawan bencana				

Sumber: Data diolah, 2025

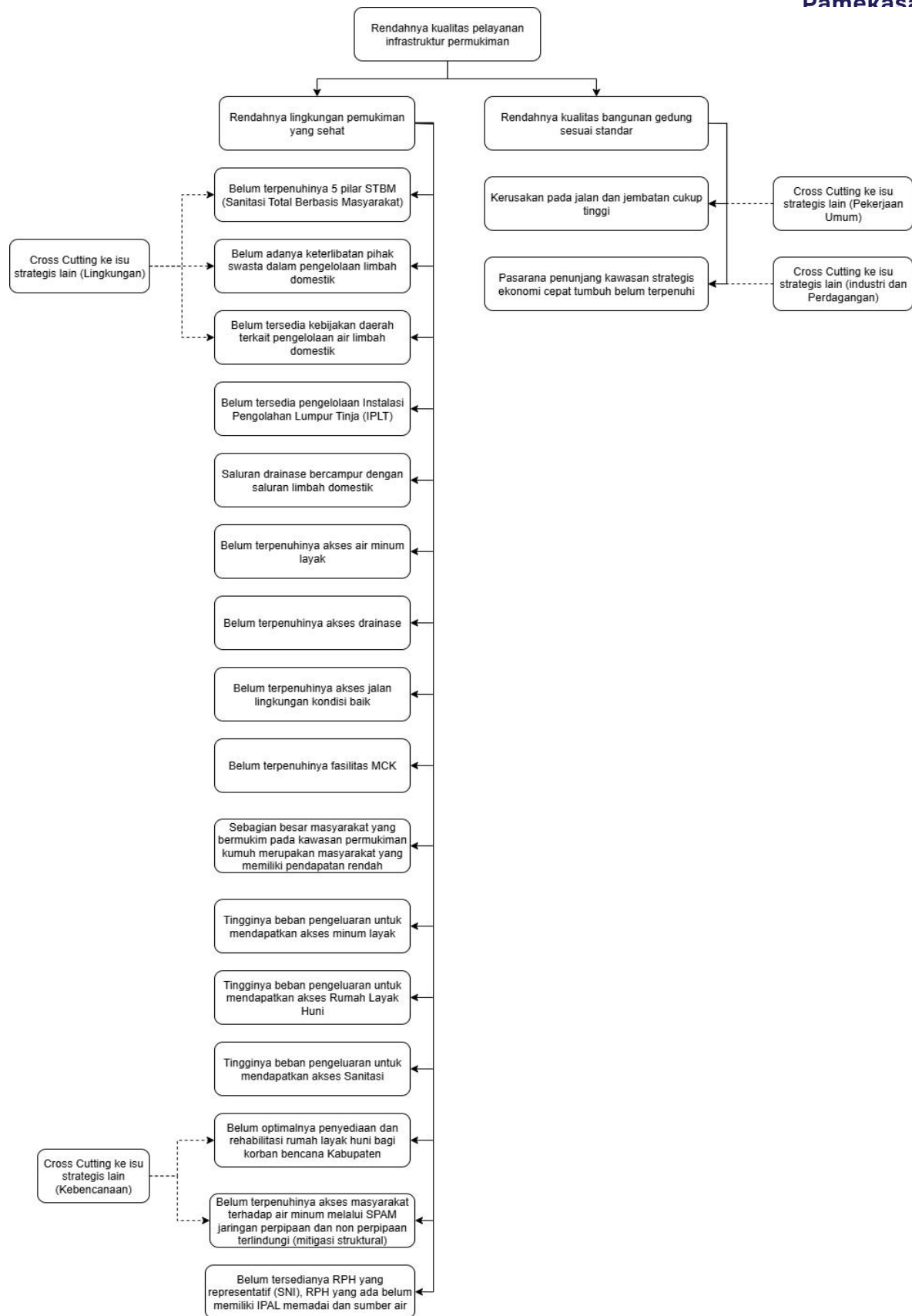
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan sektor perumahan dan kawasan organisasi organisasi di Kabupaten Pamekasan, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur organisasi . Permasalahan ini menjadi akar dari berbagai isu turunan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan utama tersebut dapat diwujudkan dalam dua aspek besar, yaitu Rendahnya Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Rendahnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar.

Rendahnya lingkungan permukiman yang sehat ini ditandai dengan belum terpenuhinya lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang meliputi akses air minum layak, sanitasi layak, dan drainase lingkungan yang memadai. Beberapa faktor yang memperparah kondisi tersebut antara lain Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan limbah domestik, Belum tersedianya kebijakan daerah dan fasilitas pengolahan limbah, seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Saluran drainase yang masih bercampur dengan limbah domestik , yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat, Terbatasnya akses terhadap air layak minum, drainase, dan fasilitas MCK di kawasan usaha padat, Sebagian besar masyarakat besar penghuni kawasan kumuh merupakan kelompok tempat tinggal rendah , sehingga memiliki keterbatasan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan dan sanitasi, Tingginya beban pengeluaran rumah tangga untuk memperoleh akses air bersih, rumah layak huni, dan sanitasi.

Masalah ini juga berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup yang lebih luas (cross cutting issue), seperti polusi udara, degradasi lingkungan perkotaan, dan rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan sinergi antara sektor perumahan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Rendahnya Kualitas Bangunan dan infrastruktur fisik juga menjadi perhatian utama. Beberapa permasalahan yang mencerminkan hal ini meliputi kerusakan pada jalan dan jembatan lingkungan yang cukup tinggi, sehingga menghambat mobilitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, Belum terpenuhinya sarana dan prasarana mendukung kawasan strategis ekonomi cepat tumbuh ,yang berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana , akibat terbatasnya anggaran dan kapasitas teknis pemerintah daerah, Belum terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan non-perpipaan yang berfungsi sebagai bagian dari mitigasi struktural terhadap risiko bencana kekeringan, Belum tersedianya Perwakilan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai SNI , yang menyebabkan permasalahan kebersihan lingkungan dan sanitasi.

Kondisi ini memiliki keterkaitan lintas sektor (cross cutting issue) dengan bidang pekerjaan umum, industri dan perdagangan, serta kebencanaan. Pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan organisasi yang tidak terintegrasi dengan sistem infrastruktur dasar lainnya akan berimplikasi pada rendahnya ketahanan lingkungan organisasi dan menurunnya kualitas tata ruang kawasan. Berikut adalah pohon permasalahan dari 2 permasalahan utama diatas.



Gambar 2-2 Pohon Permasalahan Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Sumber: Data diolah, 2025

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Pamekasan **“BANGKIT BERSAMA UNTUK PAMEKASAN MAJU”**, dengan 4 Misi pendukung yang telah ditetapkan yaitu :

- Misi 1** : Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berkarakter (Agamis, Berbudaya, Harmonis, dan Cinta Lingkungan)
- Misi 2** : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal.
- Misi 3** : Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan.
- Misi 4** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Lincah untuk Pelayanan Publik yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk dalam Misi ke-1 dan Misi ke-3. Misi 1 pembangunan Kabupaten Pamekasan untuk periode 2025-2029 adalah mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, transformasi sosial ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, budaya, dan sikap masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai agama, budaya lokal, keharmonisan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan

Misi ke-1 ini berpedoman pada Tujuan ke-2 yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas hidup manusia dengan sasaran strategis peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Usia harapan hidup. Outcome yang diharapkan dari sasaran strategis tersebut adalah Meningkatkan akses pengolahan dan pengembangan sistem air limbah, Meningkatkan akses air minum layak, Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Berkurangnya RTLH. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, mengurangi angka kematian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, diharapkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan akan meningkat.

Pada Misi ke-3 Isu lingkungan dan kebencanaan merupakan salah satu isu penting yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam misi ketiga ini. Pada misi ketiga ini upaya mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana daerah dengan pendekatan rekayasa infrastruktur dan pendekatan rekayasa lingkungan. Rekayasa infrastruktur mencakup perancangan dan pembangunan struktur yang lebih tahan terhadap bencana, seperti gedung tahan gempa, jembatan yang mampu menahan beban ekstrem, dan sistem drainase yang dapat mengurangi risiko banjir. Pendekatan selanjutnya adalah perekrutasaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.

Untuk dapat mewujudkan misi ketiga yaitu Mengurangi Risiko Bencana Daerah Melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai salah satu upaya penjenjangan kinerja pemerintah daerah melalui cascading kinerja. Tujuan pembangunan pada misi ketiga ini adalah Menurunnya Risiko Bencana Daerah dengan indikator kinerja adalah Indeks Risiko Bencana.

Tujuan pembangunan ini memiliki empat sasaran, yaitu meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana dengan indikator



sasaran adalah Indeks Ketahanan Daerah. Pada sasaran kedua adalah Peningkatan efektivitas mitigasi struktural bencana tematik dengan indikator kinerja luasan daerah rawan banjir, luasan daerah rawan kekeringan, luasan abrasi dan erosi dan luasan daerah rawan longsor. Sasaran ketiga adalah Peningkatan kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator kinerja Persentase kejadian kebakaran yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah kabupaten. Sasaran keempat adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Tabel 3- 1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
		Sasaran			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks		0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81
		<i>Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman</i>									
			Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	82,01	84,90	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40
		<i>Meningkatnya Akses Perumahan dan Permukiman Yang Layak Berkelanjutan</i>									
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	65.61	66.3	67.06	68.31	69.65	70.67	71.91



Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.											
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/ Kota											
Penyelenggar aan PSU perumahan.											
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat										
		<i>Meningkatnya Akses Perumahan dan Permukiman Yang Layak Berkelanjutan</i>									



Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota .			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	65.61	66.3	67.06	68.31	69.65	70.67	71.91
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/ kota											
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/ kota.											



Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.			Luas kawasan kumuh	Ha	73,30	61,08	48,86	36,64	24,42	12,20	0,00
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.											
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standar									



Penyelenggar aan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/ kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung			Persentase tertib penyelenggara an bangunan gedung	%	29,06	66,67	73,34	80,01	86,68	93,35	100,00
Penyelenggar aan pelatihan tenaga terampil konstruksi.											
Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggar aan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.											



		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah									
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	81.80	85	85	85	85	85	85

Sumber: SIPD, 2025

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Tujuan Perangkat Daerah ini memiliki dua sasaran dengan lima indikator sasaran strategis. Sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan empat indikator sasaran yaitu, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Luasan Kawasan Kumuh, Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.



Gambar 3- 1 Cascading Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Data diolah, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Sub bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.



Tabel 3-2 Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum terpenuhinya 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Sanitasi Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan limbah domestik Belum tersedia kebijakan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik Belum terpenuhinya fasilitas MCK Belum tersedia pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Akses Perumahan dan Permukiman Yang Layak Berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar permukiman (air minum, sanitasi, drainase, dan perumahan layak huni yang terjangkau).	Peningkatan layanan pengelolaan air limbah domestik yang layak dan berkelanjutan.



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum tersedianya RPH yang representatif (SNI), RPH yang ada saat ini belum memiliki IPAL yang memadai dan sumber air		Meningkatnya Akses Perumahan dan Permukiman Yang Layak Berkelanjutan		
Saluran drainase bercampur dengan saluran limbah domestik				Penyediaan sistem drainase yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kawasan permukiman.
Belum terpenuhinya akses drainase				Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air minum perpipaan.
Belum terpenuhinya akses air minum layak				Menambah unit produksi dan jaringan distribusi SPAM, Memprioritaskan desa dan kawasan rawan kekeringan dalam pembangunan jaringan air minum.
Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses minum layak				



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum terpenuhinya akses jalan lingkungan kondisi baik				Penataan bangunan dan lingkungan untuk mendukung hunian yang layak dan berwawasan lingkungan.
Sebagian besar masyarakat yang bermukim pada kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (termasuk Kawasan Kumuh) yang Berkelanjutan
Tingginya beban pengeluaran untuk mendapatkan akses Rumah Layak Huni				Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Hunian Layak dan Terjangkau
				Penyediaan PSU perumahan yang memadai untuk mendukung lingkungan hunian yang layak.



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten				Penyediaan hunian layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana melalui program bantuan perumahan.
				Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat terdampak relokasi pembangunan daerah.
				Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat upaya mitigasi bencana
Prasarana penunjang kawasan strategis ekonomi cepat tumbuh belum terpenuhi		Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang sesuai standar	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan prasarana dasar pendukung kawasan strategis ekonomi agar mendukung pertumbuhan wilayah dan investasi.	Peningkatan Kualitas dan Keamanan Bangunan Gedung sesuai Standar Serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
Kerusakan pada jalan dan jembatan cukup tinggi				Pengembangan dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Akuntabel.



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: data diolah, 2025

Dalam upaya mewujudkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2026–2030 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi di sektor perumahan dan permukiman. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, keterbatasan akses terhadap air minum layak dan sanitasi aman, kondisi kawasan permukiman kumuh yang belum seluruhnya tertangani, serta masih rendahnya kualitas bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar teknis. Selain itu, aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi juga masih memerlukan penguatan agar dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan yang efektif dan berdaya saing.

Berdasarkan isu strategis tersebut, arah pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dirumuskan sejalan dengan tema besar pembangunan daerah yang terbagi dalam lima tahapan pelaksanaan. Setiap tahapan diarahkan untuk menjawab tantangan sektoral, memperkuat tata kelola, dan memperluas dampak pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahap I (Tahun 2026), fokus utama diarahkan pada memperkuat landasan perencanaan melalui penyusunan dan pemutakhiran dokumen strategis seperti Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL), serta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Tahapan ini menjadi dasar penguatan arah pembangunan sektoral yang terukur, terpadu, dan sesuai kebutuhan daerah.

Selanjutnya, pada Tahap II (Tahun 2027), pembangunan diarahkan pada optimalisasi peran, dengan memperkuat kapasitas perangkat daerah, sinergi lintas sektor, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas perumahan dan permukiman. Upaya ini mencakup



percepatan penanganan RTLH, perluasan akses SPAM, dan penataan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

Pada Tahap III (Tahun 2028), penekanan diarahkan pada penguatan kolaborasi, baik antar-perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pusat, maupun dengan masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pembangunan hunian layak, meningkatkan investasi infrastruktur dasar permukiman, serta memperkuat kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Tahap IV (Tahun 2029) difokuskan pada penguatan partisipasi, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hunian, pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya hunian yang sehat dan aman. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci keberlanjutan hasil pembangunan di tingkat lokal.

Terakhir, Tahap V (Tahun 2030) diarahkan pada stabilisasi, yakni memastikan keberlanjutan capaian pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui konsolidasi hasil, peningkatan kualitas tata kelola, dan pemantapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahapan ini juga berfungsi sebagai momentum evaluasi dan penyempurnaan kebijakan menuju arah pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, seluruh arah kebijakan Dinas PRKP Kabupaten Pamekasan pada periode 2026–2030 tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas hunian dan infrastruktur dasar permukiman, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tata kelola pembangunan yang terencana, kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan.



Tabel 3-3 Tema Pembangunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pamekasan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Memperkuat landasan perencanaan RISPAM, RISPAL, dan RP3KP	optimalisasi peran, dengan memperkuat kapasitas perangkat daerah, sinergi lintas sektor, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas perumahan dan permukiman	penguatan kolaborasi, baik antar-perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pusat, maupun dengan masyarakat dan sektor swasta	penguatan partisipasi, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hunian, pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya hunian yang sehat dan aman	stabilisasi yakni dengan memastikan keberlanjutan capaian pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui konsolidasi hasil, peningkatan kualitas tata kelola, dan pemantapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjadi bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas & fungsi Perangkat Daerah serta selaras dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan induk yang memuat visi, misi, dan program prioritas pemerintah daerah untuk lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RTRW, serta diselaraskan dengan NSPK yang ada. Sedangkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan 2025-2029 merupakan dokumen operasional yang menjabarkan secara detail bagaimana Dinas akan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian,

terlihat jelas bahwa keselarasan operasionalisasi antara NSPK, RPJMD, dan Renstra DPRKP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap upaya pembangunan di Kabupaten Pamekasan, dari tingkat kebijakan strategis hingga pelaksanaan teknis di lapangan, bergerak dalam satu kesatuan tujuan. Ini mencegah tumpang tindih program dan memastikan sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Tabel 3-4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra-Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.	Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana masyarakat (melalui peningkatan desa tangguh bencana)	Penyediaan dan Fasilitas Hunian bagi Warga Terdampak Bencana					
			Penyediaan dan Fasilitas Hunian bagi Warga Terdampak Relokasi Program Pembangunan Daerah.					
2	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Hunian Layak dan Terjangkau					
			Penyediaan PSU perumahan yang memadai untuk mendukung lingkungan hunian yang layak.					
			Menambah unit produksi dan jaringan distribusi SPAM, Memprioritaskan desa dan					



			kawasan rawan kekeringan dalam pembangunan jaringan air minum.					
			Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman terhadap akses sanitasi layak dan aman					
			Penyediaan sistem drainase yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kawasan permukiman.					
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (termasuk Kawasan Kumuh) yang Berkelanjutan					
			Penataan bangunan dan lingkungan untuk mendukung hunian yang layak dan berwawasan lingkungan.					

Sumber: data diolah, 2025



Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menetapkan arah kebijakan strategis untuk periode tahun 2026–2030. Arah kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, permasalahan sektoral, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek ketersediaan hunian layak, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penataan kawasan permukiman.

Kebijakan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat daya dukung infrastruktur dasar permukiman. Fokus kebijakan juga diarahkan pada penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pembangunan daerah, peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, Dinas PRKP Kabupaten Pamekasan menekankan pentingnya pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang berkelanjutan, khususnya di kawasan rawan kekeringan dan daerah dengan sanitasi belum layak. Selain itu, kebijakan pengembangan sistem drainase permukiman difokuskan untuk mengurangi risiko genangan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan tinggal masyarakat.

Selanjutnya, arah kebijakan juga menitikberatkan pada penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman melalui pendekatan terpadu dan partisipatif, yang melibatkan kolaborasi antar perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Upaya penataan bangunan dan lingkungan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar

teknis bangunan gedung serta mendukung penerapan prinsip bangunan hijau dan berwawasan lingkungan.

Dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi, memperkuat pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola sektor perumahan dan permukiman yang akuntabel dan transparan. Seluruh arah kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten setiap tahun dari 2026 hingga 2030, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian dan lingkungan permukiman yang layak.

Tabel 3-5 Tahapan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan dan Fasilitasi Hunian bagi Warga Terdampak Bencana	√	√	√	√	√
2	Penyediaan dan Fasilitasi Hunian bagi Warga Terdampak Relokasi Program Pembangunan Daerah.	√	√	√	√	√
3	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Hunian Layak dan Terjangkau	√	√	√	√	√
4	Penyediaan PSU perumahan yang memadai untuk mendukung lingkungan hunian yang layak.	√	√	√	√	√
5	Menambah unit produksi dan jaringan distribusi SPAM, Memprioritaskan desa dan kawasan rawan kekeringan dalam pembangunan jaringan air minum.	√	√	√	√	√
6	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman terhadap akses sanitasi layak dan aman	√	√	√	√	√



7	Penyediaan sistem drainase yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kawasan permukiman.	√	√	√	√	√
8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (termasuk Kawasan Kumuh) yang Berkelanjutan	√	√	√	√	√
9	Penataan bangunan dan lingkungan untuk mendukung hunian yang layak dan berwawasan lingkungan.	√	√	√	√	√
10	Peningkatan Kualitas dan Keamanan Bangunan Gedung sesuai Standar Serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan.	√	√	√	√	√
11	Pengembangan dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Akuntabel.	√	√	√	√	√
12	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√	√	√	√	√
13	Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat upaya mitigasi bencana	√	√	√	√	√

Sumber: data diolah, 2025

3.2.1 Integrasi Janji Politik dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan janji politik Bupati ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD. Hal ini bertujuan agar setiap janji politik tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Salah satu bentuk nyata integrasi tersebut dapat dilihat pada program dan kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Janji politik Bupati yang menekankan pada penyediaan akses layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta pengembangan kawasan strategis, telah dijabarkan ke dalam kegiatan operasional. Beberapa di antaranya meliputi :

1. **Penyediaan akses air minum untuk pondok pesantren.**

Janji politik ini diintegrasikan melalui *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*, dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota. Fokusnya adalah peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, yang dikelola oleh Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih.

2. **Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan kekeringan melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan.**

Komitmen ini dituangkan dalam kegiatan pengembangan SPAM berbasis jaringan perpipaan, khususnya untuk wilayah-wilayah perdesaan dan rawan kekeringan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD dalam meningkatkan akses layanan air bersih yang merata.



3. **Penyediaan akses air limbah domestik untuk pondok pesantren.**

Untuk mendukung sanitasi layak, program pengelolaan air limbah domestik (SPALD) diarahkan pada penyediaan sistem pengolahan terpusat skala komunitas atau pesantren. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, tetapi juga sejalan dengan target pembangunan lingkungan permukiman sehat dalam RPJMD.

4. **Pembangunan jalan kawasan agropolitan dan minapolitan.**

Janji ini diintegrasikan melalui *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*, dengan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan di daerah. Sub kegiatannya berfokus pada peningkatan aksesibilitas kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

5. **Pembentukan kampung nelayan untuk mengurangi/mencegah kawasan kumuh di daerah pesisir.**

Komitmen ini dijabarkan ke dalam *Program Kawasan Permukiman*, dengan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha. Sub kegiatannya berupa pelaksanaan peremajaan kawasan kumuh pesisir, yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan permukiman berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi janji politik Bupati ke dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan bukan hanya sebuah formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan visi politik dengan kebijakan pembangunan. Seluruh program dan kegiatan yang disusun akan dilaksanakan oleh bidang/unit kerja terkait secara terkoordinasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pamekasan melalui lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.

**Tabel 3-6 Integrasi Janji Politik**

NO	PROGRAM POLITIS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG/ UNIT KERJA
1	Penyediaan akses air minum untuk pondok pesantren	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaian	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
2	Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan kekeringan melalui perpipaan dan non perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaian	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3	Penyediaan akses air limbah domestik untuk pondok pesantren	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
4	Pembangunan jalan kawasan agropolitan dan minapolitan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan
5	Pembentukan kampung nelayan untuk mengurangi/mencegah kawasan kumuh pada daerah pesisir	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2029

Keselarasan antara janji politik Kepala Daerah dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan merupakan kunci untuk memastikan visi dan misi politik dapat diwujudkan melalui program kerja yang konkret dan terukur. Janji-janji politik yang telah dikampanyekan Bupati Pamekasan memiliki keterkaitan



langsung dengan program dan sub-kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra DPRKP. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang untuk menerjemahkan komitmen politik menjadi aksi nyata. Tabel di atas memperlihatkan alur yang sangat linear. Setiap janji politik memiliki wadah operasional yang jelas dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang kemudian akan dipecah lagi menjadi kegiatan dan sub-kegiatan yang lebih teknis. Seperti halnya janji politik terkait penyediaan air minum dan air limbah di pondok pesantren dan daerah rawan kekeringan secara langsung terakomodasi dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan hak dasar masyarakat akan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, yang menjadi sasaran utama dalam Renstra. Selain itu janji untuk membangun jalan di kawasan Agropolitan dan Minapolitan sejalan dengan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang mana sub-kegiatan yang ada akan menjadi kendaraan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi di kawasan strategis ini. Janji politik lainnya yaitu membentuk kampung nelayan untuk mengurangi kawasan kumuh, terintegrasi penuh ke dalam Program Kawasan Permukiman. Hal ini memastikan bahwa upaya penataan permukiman tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat tertentu, seperti nelayan, sesuai dengan kebutuhan spesifik di daerah pesisir.



BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran aksi yang lebih spesifik dan terukur dari sebuah Program. Sub kegiatan adalah penjabaran atau rincian tindakan teknis di lapangan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Target adalah ukuran atau sasaran spesifik, terukur, dan realistis yang ingin dicapai dalam sebuah program, kegiatan, atau sub kegiatan. Target berfungsi sebagai patokan keberhasilan yang harus diwujudkan dalam periode perencanaan tertentu. Pagu indikatif adalah perkiraan atau plafon anggaran yang dialokasikan untuk suatu program, kegiatan, atau sub kegiatan dalam proses perencanaan. Angka ini bersifat tidak mengikat dan menjadi acuan awal bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Pagu indikatif menunjukkan seberapa besar sumber



daya finansial yang direncanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan dan sasaran serta indikator dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang relevan dengan sasaran RPJMD .



Tabel 4- 1 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat					Usia Harapan Hidup		
	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		
		Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	



			Meningkatnya akses terhadap air minum pada daerah rawan kekeringan		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota		
						<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan</i>		
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	



				Terlaksananya Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terlaksananya Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	



		Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD S dan SPALD T)		Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
						<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan</i>		



				Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelola an Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengelola an Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Terlaksananya Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
				Tersedianya jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Terselenggaranya Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	



				Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Terselenggaranya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	



			Meningkatnya sistem pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan		Luasan genangan air wilayah perkotaan		
						<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan</i>	<i>Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan</i>		
				Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Terlaksananya Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	



				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
		Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan			<i>Luasan Kawasan Kumuh</i>		
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah		Persentase penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota		
						<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	



				Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan		
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Berkurangnya luasan kawasan kumuh		persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
				Terpenuhinya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan		



				Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya		
				Terlaksananya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	



						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
				Tersedianya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	



Meningkatnya kapasitas daerah penanggulangan bencana		Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak berkelanjutan			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah Kabupaten/ Kota		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni		
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	



				<i>Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten/kota</i>	<i>Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan</i>		
				Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
				Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani		



						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan		
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman	



				berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kumuh Baru	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar			Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung		
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Bangunan Gedung yang berkualitas dan sesuai standar		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota		
						Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	



				Teselenggaranya bangunan gedung, pemberian IMB dan SLF di wilayah daaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan		
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepenting an Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongka ran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	



						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Berkembang nya Jasa Konstruksi yang memiliki sertifikasi dan kompetensi		Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/ analisis		
					Persentase Pengawa san penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesu ai dengan peratu ran perundang- undangan		
						<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	
				<i>Terselenggaraan ya pelatihan tenaga terampil konstruksi</i>	<i>Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan</i>		



				Tersedianya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sistem Informasi Penyelenggara Jasa Konstruksi	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan		
				Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	



						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggara jasa konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi		
				Terselenggaranya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	



				Terselenggaranya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya PSU Perumahan		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
				Terselenggaranya urusan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU		



				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi		
						<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Tersusunnya Berita Acara penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota		



				Tersusunnya Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		



						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



				Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



				Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
			Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah		Persentase penyelesaian izin membuka tanah		
						Penerbitan Izin Membuka Tanah	
				Terselenggaranya Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan		



				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya Penatagunaan Tanah		Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas		
					Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah		
					Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota		



					Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB		
						Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten kota yang dikoordinasikan		
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	



				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	



				Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	
						PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	



			Meningkat nya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente		Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran		
					Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran		
					Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran		



					jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran		
						<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah</i>	<i>Jumlah data penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu daerah</i>		



				Kabupaten/Kota	kabupaten/kota		
				Terlaksananya Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	



				Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
				Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
						Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



				<i>Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>		
				Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	



			Meningkat nya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu		
					Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
					Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	



				<i>Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas</i>		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	



				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah		Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan		
					persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja ASN		Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu		
					Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



				<i>Terselenggaranya pelatihan dan atau bimbingan teknis pegawai</i>	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi</i>		
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah		Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah sarana yang layak fungsi</i>		



				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pemenuhan rencana pengadaan barang milik daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi		



				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pemenuhan rencana pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



				Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: SIPD, 2025



Tabel 4- 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Rp42.1 46.767 .667		Rp31.6 32.525. 074		Rp32.2 80.511. 788		Rp32.7 83.478. 369		Rp33. 291.4 74.61 6	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	%	63,68	68,09	Rp13.8 24.896 .667	68,59	Rp11.9 36.893. 050	69,09	Rp12.2 33.934. 307	69,59	Rp12.5 41.372. 007	70,09	Rp12. 859.5 70.02 8	



Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	SPAM	4	4	Rp13.8 24.896 .667	4	Rp11.9 36.893. 050	4	Rp12.2 33.934. 307	4	Rp12.5 41.372. 007	4	Rp12. 859.5 70.02 8	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	1	Rp25.0 00.000	1	Rp150.0 00.000	1	Rp150.0 00.000	1	Rp150.0 00.000	1	Rp150. 000.00 0	
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/ Detik	63	22	Rp4.00 0.000.0 00	10	Rp2.500 .000.00 0	10	Rp2.500 .000.00 0	10	Rp2.500 .000.00 0	10	Rp2.50 0.000. 000	Janji Politik
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/ Detik	66	51	Rp9.64 9.896.6 67	46	Rp8.486 .893.05 0	48	Rp8.783 .934.30 7	50	Rp9.091 .372.00 7	52	Rp9.40 9.570. 028	Janji Politik
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	1	Rp50.0 00.000	1	Rp100.0 00.000	1	Rp100.0 00.000	1	Rp100.0 00.000	1	Rp100. 000.00 0	



Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	28	1	Rp50.000.000	1	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	495	1	Rp50.000.000	12	Rp500.000.000	12	Rp500.000.000	12	Rp500.000.000	12	Rp500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	94,58	95,78	Rp10.811.871.000	96,06	Rp11.061.871.000	96,34	Rp11.061.871.000	96,62	Rp11.061.871.000	96,9	Rp11.061.871.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	SPALD	2	2	Rp10.811.871.000	3	Rp11.061.871.000	3	Rp11.061.871.000	3	Rp11.061.871.000	3	Rp11.061.871.000	



Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi	Unit	1	1	Rp50.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	MA3/Hari	221	96	Rp7.811.871.000	96	Rp7.811.871.000	96	Rp7.811.871.000	96	Rp7.811.871.000	96	Rp7.811.871.000	
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	MA3/Hari	30	52.8	Rp2.700.000.000	48	Rp2.500.000.000	48	Rp2.500.000.000	48	Rp2.500.000.000	48	Rp2.500.000.000	Janji Politik
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	Rp0	40	Rp100.000.000	40	Rp100.000.000	40	Rp100.000.000	40	Rp100.000.000	



Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rumah Tangga	5	15	Rp50.000.000	15	Rp100.000.000	15	Rp100.000.000	15	Rp100.000.000	15	Rp100.000.000	
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M3/Hari	-	1	Rp25.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	-	1	Rp50.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	
Pembinaan & Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik (SPALD)	Orang	35	35	Rp50.000.000	35	Rp100.000.000	35	Rp100.000.000	35	Rp100.000.000	35	Rp100.000.000	



Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	3	Rp75.000.000	2	Rp150.000.000	2	Rp150.000.000	2	Rp150.000.000	2	Rp150.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Ha	249,64	233,78	Rp225.000.000	-	Rp 0	-	Rp 0	-	Rp 0	-	Rp 0	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Sistem Drainase	3	2	Rp225.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	1135	120	Rp150.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	3	1	Rp50.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	



Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	0	1	Rp25.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	%	29,06	46,66	Rp100.000.000	59,99	Rp3.200.000.000	73,32	Rp3.200.000.000	86,65	Rp3.200.000.000	100	Rp3.200.000.000	
<i>Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberi an Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan</i>	<i>Penyelenggaraan</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Rp100.000.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp3.200.000.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp3.200.000.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp3.200.000.000</i>	<i>2</i>	<i>Rp3.200.000.000</i>	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	15	Rp50.000.000	15	Rp3.000.000.000	15	Rp3.000.000.000	15	Rp3.000.000.000	15	Rp3.000.000.000	



Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	176	200	Rp50.000.000	200	Rp200.000.000	200	Rp200.000.000	200	Rp200.000.000	200	Rp200.000.000	0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/ Kota	%	32,89	46,66	Rp16.790.000.000	59,99	Rp5.093.261.024	73,32	Rp5.417.706.481	86,65	Rp5.540.235.362	100	Rp5.720.033.588	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	Penataan Bangunan	1	1	Rp16.790.000.000	1	Rp5.093.261.024	1	Rp5.417.706.481	1	Rp5.540.235.362	1	Rp5.720.033.588	



Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasa n	528	124	Rp16.7 90.000. 000	25	Rp5.093 .261.02 4	27	Rp5.417 .706.48 1	28	Rp5.540 .235.36 2	29	Rp5.72 0.033. 588	Janji Politik
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/ analis	%	114,28	95,86	Rp225. 000.00 0	96,89	Rp231. 500.000	97,92	Rp237. 000.000	98,95	Rp270. 000.000	100	Rp280. .000.0 00	
	Persentase Pengawasan penyelenggaraan n Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60,7	100	Rp170. 000.00 0	100	Rp109. 000.000	100	Rp130. 000.000	100	Rp170. 000.000	100	Rp170. .000.0 00	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan	2	2	Rp225. 000.00 0	2	Rp231. 500.00 0	2	Rp237. 000.00 0	2	Rp270. 000.00 0	2	Rp280. .000.0 00	



Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	2	90	Rp125.000.000	90	Rp127.000.000	90	Rp127.000.000	105	Rp150.000.000	105	Rp150.000.000	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	88	165	Rp5.000.000	170	Rp7.500.000	175	Rp10.000.000	180	Rp15.000.000	185	Rp20.000.000	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Lembaga	160	25	Rp95.000.000	40	Rp97.000.000	50	Rp100.000.000	60	Rp105.000.000	75	Rp110.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	Sistem Informasi	0	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	-	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	1	Rp20.000.000	



Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	%	43,18	88,11	Rp150.000.000	91,08	Rp89.000.000	94,05	Rp110.000.000	97,02	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	48	70	Rp10.000.000	80	Rp12.000.000	90	Rp15.000.000	100	Rp20.000.000	100	Rp20.000.000	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	-	30	Rp5.000.000	30	Rp5.000.000	30	Rp5.000.000	50	Rp10.000.000	50	Rp10.000.000	
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	74	50	Rp50.000.000	50	Rp60.000.000	80	Rp75.000.000	100	Rp100.000.000	100	Rp100.000.000	



Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	0	70	Rp10.000.000	80	Rp12.000.000	90	Rp15.000.000	100	Rp20.000.000	100	Rp20.000.000	
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	Rp75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp7.128.847.566		Rp16.716.146.311		Rp16.566.146.311		Rp16.566.146.311		Rp16.566.146.311	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	98,41	100	Rp1.000.000.000	100	Rp660.000.000	100	Rp660.000.000	100	Rp660.000.000	100	Rp660.000.000	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan	%	0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	



	rumah yang layak huni													
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan	%	11,64		Rp1.000.000.000		Rp660.000.000		Rp660.000.000		Rp660.000.000		Rp660.000.000	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi	Unit Rumah	10	30	Rp1.000.000.000	30	Rp660.000.000	30	Rp660.000.000	30	Rp660.000.000	30	Rp660.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit Rumah	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	10.28	40,18	Rp120.000.000	55,14	Rp2.000.000.000	70	Rp2.000.000.000	85,04	Rp2.000.000.000	100	Rp2.000.000.000	



Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	0	73,34	Rp20.000.000	80,01	Rp50.000.000	86,68	Rp50.000.000	93,35	Rp50.000.000	100	Rp50.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan & Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	1	Rp20.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	Kawasan	1	1	Rp50.000.000	1	Rp450.000.000	1	Rp450.000.000	1	Rp450.000.000	1	Rp450.000.000	
Penyusunan/ Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	2	2	Rp50.000.000	2	Rp450.000.000	2	Rp450.000.000	2	Rp450.000.000	2	Rp450.000.000	



Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Kualitas	1	1	Rp50.000.000	1	Rp1.500.000.000	1	Rp1.500.000.000	1	Rp1.500.000.000	1	Rp1.500.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	-	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	-	2,9	Rp50.000.000	2,9	Rp1.500.000.000	2,45	Rp1.500.000.000	2,45	Rp1.500.000.000	2,45	Rp1.500.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	%	2,42	1,4	Rp250.000.000	1,06	Rp7.550.000.000	0,72	Rp7.550.000.000	0,38	Rp7.550.000.000	0,04	Rp7.550.000.000	



Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Perbaikan RTLH	1		Rp250.000.000		Rp7.550.000.000		Rp7.550.000.000		Rp7.550.000.000		Rp7.550.000.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	285	500	Rp200.000.000	341	Rp7.500.000.000	341	Rp7.500.000.000	341	Rp7.500.000.000	341	Rp7.500.000.000	
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	-	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	



PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	8,34	26,92	Rp50.0 00.000	32,69	Rp150. 000.000	38,46	Rp150. 000.000	44,23	Rp150. 000.000	50	Rp150. .000.0 00	
Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	16,67	73,34	Rp50.0 00.000	80,01	Rp150. 000.00 0	86,68	Rp150. 000.00 0	93,35	Rp150. 000.00 0	100	Rp150. .000.0 00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	2	Rp50.0 00.000	2	Rp150.0 00.000	2	Rp150.0 00.000	2	Rp150.0 00.000	2	Rp150. 000.00 0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100	Rp70.0 00.000	100	Rp120. 000.000	100	Rp120. 000.000	100	Rp120. 000.000	100	Rp120. .000.0 00	



	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%		100	Rp10.000.000	100	Rp10.000.000	100	Rp10.000.000	100	Rp10.000.000	100	Rp10.000.000	
	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%		100	Rp69.000.000	100	Rp65.000.000	100	Rp65.000.000	100	Rp65.000.000	100	Rp65.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Perencanaan	4	4	Rp149.000.000	4	Rp195.000.000	4	Rp195.000.000	4	Rp195.000.000	4	Rp195.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Rp70.000.000	3	Rp120.000.000	3	Rp120.000.000	3	Rp120.000.000	3	Rp120.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	55	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	



Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	55	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	52	Rp5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	4	Rp69.000.000	4	Rp65.000.000	4	Rp65.000.000	4	Rp65.000.000	4	Rp65.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan	%	100	100	Rp3.613.315.046	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	
	persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu	%		100	Rp3.613.315.046	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	100	Rp3.793.146.311	



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Unit Kerja	1	1	Rp3.613.315.046	1	Rp3.793.146.311	1	Rp3.793.146.311	1	Rp3.793.146.311	1	Rp3.793.146.311	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	39	Rp3.613.315.046	39	Rp3.793.146.311	39	Rp3.793.146.311	39	Rp3.793.146.311	39	Rp3.793.146.311	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	%	44	100	Rp70.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	
	Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	%		100	Rp70.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	33	38	Rp70.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	33	38	Rp70.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	38	Rp150.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	%	76,93	100	Rp1.876.532.520	100	Rp2.218.000.000	100	Rp2.068.000.000	100	Rp2.068.000.000	100	Rp2.068.000.000	
<i>Administrasi Umum Perang kat Daerah</i>	<i>Jumlah sarana yang layak fungsi</i>	<i>Sarana</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>Rp170.000.000</i>	<i>5</i>	<i>Rp342.000.000</i>	<i>5</i>	<i>Rp342.000.000</i>	<i>5</i>	<i>Rp342.000.000</i>	<i>5</i>	<i>Rp342.000.000</i>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	Rp5.000.000	7	Rp5.000.000	7	Rp5.000.000	7	Rp5.000.000	7	Rp5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	42	45	Rp35.000.000	45	Rp45.000.000	45	Rp45.000.000	45	Rp45.000.000	45	Rp45.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	12	Rp22.000.000	12	Rp42.000.000	12	Rp42.000.000	12	Rp42.000.000	12	Rp42.000.000	



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	5	Rp28.000.000	5	Rp50.000.000	5	Rp50.000.000	5	Rp50.000.000	5	Rp50.000.000	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	77	80	Rp80.000.000	80	Rp200.000.000	80	Rp200.000.000	80	Rp200.000.000	80	Rp200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Prasarana	1	2	Rp730.000.000	2	Rp350.000.000	1	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	36	Rp90.000.000	36	Rp200.000.000	36	Rp200.000.000	36	Rp200.000.000	36	Rp200.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	1	Rp640.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	0	Rp0	5	Rp150.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Jasa Penunjang	3	3	Rp696.532.520	3	Rp1.051.000.000	3	Rp1.051.000.000	3	Rp1.051.000.000	3	Rp1.051.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	Rp6.332.520	2	Rp7.000.000	2	Rp7.000.000	2	Rp7.000.000	2	Rp7.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	217	217	Rp120.000.000	217	Rp144.000.000	217	Rp144.000.000	217	Rp144.000.000	217	Rp144.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	38	Rp570.200.000	38	Rp900.000.000	38	Rp900.000.000	38	Rp900.000.000	38	Rp900.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan	3	3	Rp280.000.000	3	Rp475.000.000	3	Rp475.000.000	3	Rp475.000.000	3	Rp475.000.000	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	Rp150.000.000	5	Rp175.000.000	5	Rp175.000.000	5	Rp175.000.000	5	Rp175.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	80	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	19	Rp80.000.000	19	Rp250.000.000	19	Rp250.000.000	19	Rp250.000.000	19	Rp250.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					Rp30.000.000		Rp1.450.000.000		Rp1.450.000.000		Rp1.450.000.000		Rp1.450.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikan nya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	-	20	Rp0	40	Rp150.000.000	60	Rp150.000.000	80	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	



Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ Kota	Berita Acara	-	3	Rp0	3	Rp150.000.000	3	Rp150.000.000	3	Rp150.000.000	3	Rp150.000.000	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara	-	1	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara	-	1	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	1	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	



PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	-	73,34	Rp30.0 00.000	80,01	Rp350. 000.000	86,68	Rp350. 000.000	93,35	Rp350. 000.000	100	Rp350. .000.0 00	
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tan ah untuk Pemb angunan oleh Pemerinta h Daerah Kabu paten/ Kota</i>	<i>Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan</i>	<i>Koordi nasi</i>	-	1	Rp30.0 00.000	1	Rp350. 000.00 0		Rp350. 000.00 0	1	Rp350. 000.00 0	1	Rp350 .000.0 00	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokum en	-	0	Rp0	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.0 00.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembang unan oleh Pemerintah Daerah Kabu paten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokum en	-	1	Rp30.0 00.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.0 00.000	



Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	



Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	0	Rp0	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	-	0	Rp0	20	Rp100. 000.000	40	Rp100. 000.000	60	Rp100. 000.000	80	Rp100. .000.000	
	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan	%	-	0	Rp0	20	Rp200. 000.000	40	Rp200. 000.000	60	Rp200. 000.000	80	Rp200. .000.000	



	masyarakat pada tahun anggaran													
	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	-	0	Rp0	20	Rp250.000.000	40	Rp250.000.000	60	Rp250.000.000	80	Rp250.000.000	
	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	-	0	Rp0	20	Rp50.000.000	40	Rp50.000.000	60	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	



Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu daerah kabupaten/ kota	7 Dokum en	-		Rp0	-	Rp350.000.000		Rp350.000.000		Rp350.000.000		Rp350.000.000
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dokum en	-		Rp0	-	Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimba ngan Landreform dalam rangka Kegiatan Redis tribusi Tanah	Dokum en	-		Rp0	-	Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfa atan Redistribusi	Dokum en	-		Rp0	-	Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000



Kabupaten/ Kota	si Tanah dalam 1(Satu) Kabupa ten/ Kota													
Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 Kabupaten/ Kota	Berita Acara	-		Rp0	-	Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.0 00.000	
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	-		Rp0	-	Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.0 00.000	
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota	Laporan	-		Rp0	-	Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.0 00.000	
Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen	-		Rp0	-	Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.0 00.000	



Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokum en	-		Rp0	-	Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokum en	-		Rp0	-	Rp100.000.000		Rp100.000.000		Rp100.000.000		Rp100.000.000
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokum en	-		Rp0	-	Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000
Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka	Dokum en	-		Rp0	-	Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000



Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee													
Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	-		Rp0	-	Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000		Rp50.00 0.000	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyelesaian izin membuka tanah	%	-	0	Rp0	20	Rp50.0 00.000	40	Rp50.0 00.000	40	Rp50.0 00.000	80	Rp50.0 00.000	
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan	Dokumen	-	0	Rp0	1	Rp50.0 00.000	1	Rp50.0 00.000	1	Rp50.0 00.000	1	Rp50.0 00.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	-	0	Rp0	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	1	Rp50.00 0.000	



PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	-	0	Rp0	20	Rp50.000.000	40	Rp50.000.000	60	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	
	Ditetapkan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	0	Rp0	20	Rp100.000.000	40	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000	80	Rp100.000.000	
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	-	0	Rp0	20	Rp100.000.000	40	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000	80	Rp100.000.000	
	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	-	0	Rp0	20	Rp50.000.000	40	Rp50.000.000	60	Rp50.000.000	80	Rp50.000.000	



Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penggu naan tanah yang hamparan nya dalam satu daerah kabupa ten kota yg di koordinasikan	Koordi nasi	-	0	Rp0	6	Rp300.000.000	6	Rp300.000.000	6	Rp300.000.000	6	Rp300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupa ten/Kota	Lapora n	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokum en	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Dokum en	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	



	Kewenangan Kabupaten/ Kota													
Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Dokumen	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	Dokumen	-	0	Rp0	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	
Total					Rp49.305.615.233		Rp49.798.671.385		Rp50.296.658.099		Rp50.799.624.680		Rp51.307.620.927	

Program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas bangunan gedung yang memenuhi standar teknis dan fungsional. Melalui Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Program ini menjadi kunci dalam mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat serta penurunan kawasan kumuh secara signifikan di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Sementara itu, melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dinas berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Pamekasan dilaksanakan sesuai standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan (4K). Upaya peningkatan pengawasan bangunan gedung, penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta pembinaan terhadap jasa konstruksi menjadi bagian integral dari strategi mewujudkan tata bangunan yang tertib, aman, dan berdaya guna. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dan penyedia jasa konstruksi juga menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pelaku pembangunan, baik aparat pemerintah maupun pihak swasta. Langkah ini mendukung terciptanya ekosistem pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Secara keseluruhan, program-program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berkontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, serta penguatan

tata kelola penyelenggaraan bangunan dan jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4- 3 Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses terhadap air minum pada daerah rawan kekeringan		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik (SPALDS dan SPALD T)		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	



			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya sistem pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	



4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Bangunan Gedung yang berkualitas dan sesuai standar	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Berkembangnya Jasa Konstruksi yang memiliki sertifikasi dan kompetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	



			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi	



			Secara Elektronik	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

Sumber: Data diolah, 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas daerah penanggulangan bencana. Program-program diatas merupakan program prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan. Melalui program-program prioritas pembangunan diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkomitmen memenuhi janji politik Kepala Daerah untuk Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dan juga Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan.

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Saat ini, kondisi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain tingginya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keterbatasan akses air bersih di sebagian wilayah yang rawan kekeringan, serta masih adanya

kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat terpilih, terukur, dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. IKU disusun dengan memperhatikan kondisi eksisting bidang perumahan dan permukiman, potensi sumber daya yang tersedia, serta isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Penentuan target keberhasilan ini dimaksudkan agar arah pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur secara obyektif dari tahun ke tahun, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya dapat dilihat secara kuantitatif tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. IKU yang ditetapkan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2029 dengan orientasi pencapaian yang mendukung target pembangunan nasional “akses hunian layak, air minum aman, dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat” pada tahun 2030. Dengan demikian, IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan juga menjadi bagian dari kontribusi daerah terhadap target pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama pada Tujuan ke-6 dan Tujuan ke-11.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini juga tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sehingga program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target RPJMD tetapi juga memberikan manfaat nyata di lapangan. Dengan berlandaskan indikator kinerja yang jelas serta dukungan program prioritas pembangunan daerah, diharapkan pada periode RPJMD 2025–2029 kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan dapat semakin meningkat, mampu mengurangi permasalahan perumahan dan

permukiman, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui hunian layak serta lingkungan yang sehat dan tertata.

Dengan adanya penetapan IKU ini, arah pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Setiap indikator yang ditetapkan mencerminkan fokus pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, penyediaan akses air minum dan sanitasi, hingga pengendalian penataan bangunan gedung.



Tabel 4- 4 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	84,9	85	85,1	85,2	85,3	85,4	
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	66,3	67,06	68,31	69,55	70,67	71,91	
3	Luas kawasan kumuh	Ha	61,08	48,86	36,64	24,42	12,2	0	
4	Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persen	66,67	73,34	80,01	86,68	93,35	100	
5	nilai SAKIP OPD	Poin	85	85	85	85	85	85	

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan.

IKK disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan target nasional terkait penyediaan hunian layak, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan akses air minum, dan sanitasi.

Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan merupakan indikator terpilih, spesifik, dan relevan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga mampu mencerminkan capaian kinerja yang nyata. Penetapan target dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan pola pencapaian yang terukur dan realistis sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, dukungan lintas sektor, serta kondisi aktual masyarakat Kabupaten Pamekasan.



Tabel 4- 5 Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	67,59	68,09	68,59	69,09	69,59	70,09	
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	95,5	95,78	96,06	96,34	96,62	96,9	
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	33,33	46,66	59,99	73,32	86,65	100	
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	94,83	95,86	96,89	97,92	98,95	100	
5	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	SPM
7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi	Persen	100	0	0	0	0	0	SPM



	penyediaan rumah yang layak huni								
8	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	25,23	40.18	55.14	70.00	85.04	100	
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	1,74	1,4	1,06	0,72	0,38	0,04	
10	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	22.22	26.92	32.69	38.46	44.23	50.00	
11	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
12	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
13	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
14	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	



15	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	20	40	60	80	
16	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
17	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
18	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	
19	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persenta se realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	0	0	20	40	60	80	

Sumber: Data diolah, 2025



BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, telah ditetapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sementara evaluasi dilakukan melalui penilaian capaian indikator kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP). Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan dan penyesuaian kebijakan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terus

adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan strategis.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki arah yang jelas dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman. Harapannya, seluruh upaya yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, pihak swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman benar-benar menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang lebih maju, tertata, dan berkelanjutan.

Pamekasan, 04 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

NIP. 19680330 199803 1 006

Pembina Utama Muda



KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025 - 2029



LAMPIRAN

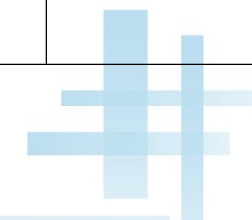
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2029

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (IIPP) adalah indikator komposit yang mengukur kemajuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu wilayah. IIPP umumnya mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, dan RTLH. Indikator ini mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang layak huni bagi masyarakat.	Formula IIPP tidak disajikan dalam bentuk baku oleh BPS, melainkan dihitung oleh masing-masing kementerian atau lembaga teknis dengan metodologi yang mengacu pada data BPS. Secara umum, IIPP merupakan gabungan dari beberapa sub-indikator yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang atau rata-rata geometrik. $IIPP = f(\text{AksesAir Minum, AksesSanitasi, Kualitas Jalan Lingkungan, dan RTLH})$ - f : Distribusi kumulatif Akses Air Minum: Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Akses Sanitasi: Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Kualitas Jalan Lingkungan: Persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik. Rumah Layak Huni: Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	BPS	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya akses perumahan dan permukiman yang layak	Luas kawasan kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Kota yang di Tetapkan dalam SK Bupati/Walikota	Luas Kawasan Kumuh dengan satuan Hektare (Ha)	BPS	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

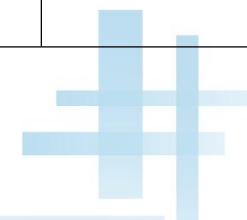


3	berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang NO. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan memenuhi : a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG dan SLF Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah(kabupaten/kota) maka	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ Metode Perhitungan pada kondisi kedua: Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupoan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak) $PHLTB \text{ proksi} = \frac{JRTHLTB \text{ proksi}}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Catatan: perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang dirilis oleh BPS	BPS	Bidang Perumahan, Pra sarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
---	---------------	---	---	--	-----	--





			pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan yaitu bangunan atap, dinding, dan lantai rumah yang memenuhi syarat 2. Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak			
6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standar	Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah indikator yang mengukur kepatuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban ini mencakup seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari tahap perizinan (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), pelaksanaan konstruksi, hingga sertifikasi kelaikan fungsi (SLF).	$= \frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Tertib Penyelenggaraan}}{\text{Jumlah Total Bangunan Gedung yang disurvei}} \times 100$ Keterangan • Bangunan Gedung yang Tertib: Bangunan yang memiliki PBG dan SLF, serta memenuhi standar teknis yang berlaku. • Bangunan Gedung yang Disurvei: Total bangunan gedung yang menjadi sampel atau target penilaian.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan, Pra sarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan





7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	<u>Penilaian SAKIP :</u> 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%	Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat
---	--	-----------------	--	--	--	-------------

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	IKK	Definisi Operasional	RUMUS	SATUAN	Penanggung Jawab
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Mengukur tingkat capaian penduduk yang mendapatkan akses air minum layak melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) baik jaringan perpipaan maupun non perpipaan pada tahun berjalan dibandingkan total penduduk kabupaten. Capaian dihitung setiap tahun berdasarkan data hasil pembangunan SPAM dan laporan capaian akses air minum.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih



2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Mengukur proporsi penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi aman (toilet dan tangki septik sesuai standar, tersambung SPALD-T, atau menggunakan layanan penyedotan lumpur tinja) terhadap total penduduk kabupaten pada tahun berjalan. Data diukur setiap tahun untuk memastikan peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar} + \text{jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N} + \text{Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional} + \text{jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku pembangunan terhadap penerbitan dan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif setiap tahun.	$\frac{\text{Permohonan PBG \& SLF yang diproses terhadap permohonan PBG \& SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG \& SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG \& SLF yang telah diterbitkan}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	Mengukur capaian jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat kompetensi kerja sesuai bidangnya terhadap target tahunan. Indikator ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM jasa konstruksi di daerah.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan



5	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang meliputi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk konstruksi sesuai ketentuan regulasi pada tahun berjalan.	$\frac{(\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk})}{3} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
6	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Mengukur capaian layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sesuai dengan rencana penanganan tahunan di wilayah kabupaten. Indikator ini menunjukkan kecepatan dan efektivitas pemulihan pascabencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Mengukur capaian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah sesuai dengan target tahunan, untuk menjamin keberlanjutan hunian pascarelokasi.	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
8	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Mengukur capaian penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman, berdasarkan luas kawasan yang ditangani dibandingkan dengan target tahunan.	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$	%	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Mengukur jumlah rumah tidak layak huni yang berhasil ditangani melalui program bantuan perbaikan rumah terhadap total RTLH yang ada di kabupaten pada tahun berjalan, untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
10	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Mengukur capaian penyediaan dan pembangunan PSU (jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sarana lainnya) pada perumahan yang dibangun di wilayah kabupaten sesuai target tahunan untuk meningkatkan kelayakan hunian.	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
11	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Mengukur realisasi luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform (TOL) serta jumlah subjek penerima manfaat sesuai target tahunan dalam rangka pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	$\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
12	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat	Mengukur realisasi tindak lanjut penetapan tanah objek reforma agraria (TORA) dan subjek penerima manfaat sesuai target tahunan yang dilakukan melalui redistribusi tanah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	$\frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan



	pada tahun anggaran				
13	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Mengukur luas tanah yang telah melalui proses ganti kerugian dan siap ditindaklanjuti menjadi objek redistribusi tanah pada tahun berjalan sesuai target yang telah direncanakan.	$\frac{\text{Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan
14	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Mengukur jumlah subjek penerima manfaat serta persentase realisasi luas objek redistribusi tanah yang telah difasilitasi dan ditetapkan sesuai dengan target tahunan kegiatan reforma agraria.	$\frac{\text{realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
15	Terselesainya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Mengukur tingkat penyelesaian kasus tanah garapan yang belum bersertipikat melalui mekanisme mediasi antara pihak terkait terhadap jumlah pengaduan kasus yang diterima pada tahun berjalan.	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
16	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Mengukur capaian jumlah desa atau kelurahan yang telah memiliki peta bidang tanah lengkap, valid, dan sesuai standar kualitas pemetaan pertanahan nasional terhadap total desa/kelurahan di kabupaten.	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas}}{\text{jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan



17	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Mengukur luas tanah aset Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah terhadap total luas aset tanah pemerintah daerah, sebagai bentuk tertib administrasi aset daerah.	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
18	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengukur capaian pelaksanaan konsolidasi tanah yang memperoleh dukungan pembangunan kewenangan kabupaten/kota terhadap total lokasi konsolidasi tanah yang direncanakan setiap tahun.	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
19	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	Mengukur luas peta nilai tanah yang telah diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap total luas wilayah kabupaten yang memiliki peta nilai tanah.	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan



POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

